

LAIN LIPI BEDA
KEMENRISTEKDIKT

SEMARANG TIDAK MELULU
HARUS LAWANG SEWU

MEDIA BPP

J E N D E L A I N F O R M A S I K E L I T B A N G A N

SENGKARUT SISTEM AKREDITASI JURNAL



VOLUME 2 NO 5 | OKTOBER 2017

litbang.kemendagri.go.id

Majalah Dwi Bulanan

P-ISSN 2503 3352

E-ISSN 2528 4181



Hit at 40mph **Hit at 30mph**

There is an 80% chance I'll die.

There is an 80% chance I'll live.

It's **30** for a reason.



SALAM REDAKSI

Salah satu ujung tombak Kelitbangan adalah produk kelitbangan itu sendiri yaitu jurnal ilmiah yang dinilai sebagai wadah dan juga ajang publikasi karya ilmiah juga hasil kelitbangan. .

Eksistensi jurnal ilmiah menjadi penting bagi dunia kelitbangan, beberapa Kementerian/Lembaga pengelola jurnal bahkan bersaing menjangkau artikel berkualitas dan berbobot. Jurnal ilmiah berkualitas juga menjadi representasi keberhasilan suatu lembaga. Tidak heran banyak beberapa lembaga yang berlomba-lomba mendaftarkan jurnalnya agar dapat terakreditasi di lembaga akreditasi terkenal seperti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan) dan Kemenristek Dikti.

Namun ternyata, masalah tidak hanya persaingan antar K/L untuk berbondong-bondong mendaftarkan jurnal ilmiahnya agar mendapat akreditasi sehingga berdampak pada kredit poin yang tinggi dan diakui, permasalahan lainnya juga berada di lembaga pengakreditasinya seperti LIPI dan Kemenristek Dikti.

Jurnal K/L berada di bawah naungan LIPI, sementara jurnal Perguruan Tinggi di

bawah naungan Kemenristek Dikti, pembagian urusan itu tidak hanya soal manajerial pengakreditasi, tetapi juga perbedaan kualitas dan kuantitasnya. Jurnal di bawah naungan Kemenristek Dikti dinilai lebih berkualitas dibandingkan dengan jurnal di bawah naungan LIPI. Kesan itu terlihat saat Dikti tidak mengakui jurnal di bawah naungan LIPI yang bernilai 5 (seharusnya bernilai 25). Perbedaan dan singgungan antara Kemenristek Dikti dan LIPI itulah yang menarik perhatian *Media BPP*, ada apa sebenarnya antara dua lembaga besar itu?

Media BPP melakukan peliputan dan wawancara mendalam bersama narasumber dari kedua belah pihak. Hasil liputan itulah yang kami suguhkan dalam laporan utama edisi Oktober 2017 kali ini.

Tidak hanya itu, beberapa berita dan ragam suguhan informasi menariknya juga turut kami suguhkan dalam edisi kali ini, seperti program kegiatan Pusat Litbang Kemendagri, manfaat besar dari si kecil kuaci, pesona keindahan Semarang, serta dua opini dari pemenang lomba artikel HUT RI Kemerdekaan di lingkungan Kemendagri, semuanya kami suguhkan sebagai jendela informasi kelitbangan yang aktual, kritis, dan terpercaya.

Redaksi..



MEDIA BPP

PELINDUNG MENTERI DALAM NEGERI TJAHJO KUMOLO
PENANGGUNG JAWAB DODI RIYADMADJI

| | |
|-------------------------|--|
| PEMIMPIN REDAKSI | JONGGI TAMBUNAN |
| REDAKTUR PELAKSANA | MOH. ILHAM A. HAMUDY |
| REDAKTUR | SUBIYONO SYABNIKMAT NIZAM SASTRI YUNIZARTI BAKRY ROCHAYATI BASRA JONGGI TAMBUNAN MOH. ILHAM A. HAMUDY |
| PENYUNTING | I NENGAH RUMAWAN BUNGERAN DAMANIK FRISCA NATALIA ELPINO WINDY |
| PELIPUTAN | INDAH F. ROSALINA SAIDI RIFKY |
| PENATA LETAK DAN GRAFIS | SAIDI RIFKY |

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ALAMAT REDAKSI
JALAN KRAMAT RAYA NO. 132, JAKARTA PUSAT
MEDIABPPKEMENDAGRI@GMAIL.COM

Informasi Kelitbangan Lebih Massif



Membaca Media BPP, saya sudah banyak melihat kemajuannya, baik dari sisi tampilan dan substansinya lebih tajam. Namun ada beberapa masukan dari saya pribadi agar Media BPP semakin maju dan menginspirasi:

1. Sebagai representative informasi jendela kelitbangan, paling tidak ada beberapa informasi kelitbangan yang dapat dijelaskan baik secara ilmiah maupun metodologis, merekam kondisi perkembangan kegiatan terkini yang relevan dengan program/kegiatan yang dilaksanakan komponen di lingkungan Kemendagri
2. Menjelaskan secara singkat cakupan penelitian yang sedang berjalan seperti kajian strategis, kajian aktual, rekayasa, dan kompetitif.
3. Memuat intisari hasil kajian yang masuk dalam kategori program unggulan penelitian BPP

Selain itu, masing-masing Kepala Komponen secara kontinyu menjelaskan secara singkat dan tematik terkait kebijakan komponen yang sedang berjalan dan ini menjadi menu Kajian BPP yang strategis, mereka juga seyogyanya menjelaskan perkembangan metodologi riset baik secara kualitatif dan kuantitatif secara singkat. Tapi secara keseluruhan, saya rasa sudah baik.

Hasudungan Hutauruk – Kabid Administrasi Kewilayahan, Puslitbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan

Terimakasih banyak atas masukannya Bpk. Hasudungan Hutauruk, sebenarnya beberapa rubrik yang disarankan Pak Hasudungan sudah tersedia di rubrik Jendela BPP, yakni memuat informasi mengenai kegiatan di pusat-pusat Kelitbangan, Bapak bisa membacanya di setiap edisi.

Redaksi

Ruang untuk Peneliti



Secara umum sudah baik, tampilan dan isu utama yang dimunculkan sangat menarik, dari sisi pengelolaan hanya kita harus memikirkan solusi bagaimana agar dari internal khususnya peneliti dapat gencar memasok artikel ke Media BPP. Barangkali perlu ditonjolkan orang-orang yang punya perhatian serta dedikasi tinggi terhadap kemajuan dunia kelitbangan.

Heriandi Roni – Kabid Otonomi Daerah Puslitbang Otda, Kesatuan Politik PUM

Terimakasih sekali Bpk. Roni atas apresiasi dan masukannya, sebenarnya beberapa ruang untuk peneliti menulis dan melemparkan gagasan sudah disediakan di rubrik opini, memang rubrik itu terbuka sangat lebar untuk semua kalangan, tapi kami senantiasa mendahulukan tulisan yang hadir dari peneliti kita. Sementara ruang inspirasi untuk para peneliti juga sudah disediakan di rubrik Tokoh, dari rubrik ini kami biasa mengangkat tokoh-tokoh peneliti yang sukses dan sudah punya nama besar, seperti pada edisi kali ini, Media BPP mengangkat profil tentang Hariz Azhar mantan Direktur KontraS. Namun, jika dirasa dua ruang itu belum cukup, tentu kami juga sangat menantikan hasil karya peneliti terlebih dahulu dan memuatnya dalam rubrik tambahan. Terimakasih

Redaksi

MEDIA BPP

VOLUME 2 NO 5 | OKTOBER 2017

BPP DAERAH 30

BPP PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

BPP DAERAH 32

BPP PROVINSI JAWA TIMUR

ANGGARKAN PENELITIAN GARAM TRADISIONAL

Selain memiliki 5 bidang garapan yang dilaksanakan pada tahun ini, BPP Jawa Timur juga tengah fokus pada kesejahteraan petani garam. Sesuai rencana, BPP Jawa Timur akan melaksanakan penelitian terkait pengelolaan garam yang berasal dari para petani tradisional. Penelitian diharapkan bisa menemukan solusi untuk meningkatkan taraf hidup para petani garam. Rencananya, garam tradisional akan dikelola seperti halnya garam industri, sehingga dengan kualitas baik, garam bisa memiliki nilai jual tinggi.

AKTIVITAS 8

JENDELA BPP 12-15

KILAS BERITA 42-43

GAYA HIDUP 44

SAINS DAN
TEKNOLOGI 45

RESENSI FILM 46

RESENSI BUKU 48

KOMIK 49

SASTRA 50

OPINI

SAATNYA ASN MELEK LITERASI 54

ANTARA DESENTRALISASI DAN
DISINTEGRASI 56

CATATAN

KOTA CERDAS 58

DAERAH 36

SEMARANG, TIDAK MELULU HARUS LAWANG SEWU

Semarang ternyata tidak melulu Lawang Sewu, banyak tempat wisata menarik yang tidak boleh dilewatkan oleh para pelancong. Awal Agustus lalu, Tim Media BPP berkesempatan mengunjungi tempat-tempat wisata menarik di Semarang dan sekitarnya, seperti Umbul Sidomukti, Candi Gedong Songo, Lereng Kelir, Brown Canyon, Pagoda Avalokitesvara, dan Candi Tugu.

TOKOH 40

Nama **Haris Azhar** mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namanya besar sebagai mantan Direktur Eksekutif KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), kini meski sudah tidak lagi di KontraS, Haris masih aktif di lembaga sejenis yang bernama **Lokataru sebuah lembaga yang bergerak di bidang hukum dan HAM**. Lantas bagaimana kiprahnya di tempat baru, dan perjalanan karirnya dari – saat – dan setelah di KontraS?

LAPORAN UTAMA 16-27

SENGKARUT SISTEM AKREDITASI JURNAL

FEBRUARI 2016 LALU, MEDIA BPP PERNAH MENYUGUHKAN LAPORAN UTAMA TERKAIT AKREDITASI NASIONAL DENGAN SISTEM SATU PINTU ATAU YANG DIKENAL DENGAN ARJUNA (AKREDITASI JURNAL NASIONAL). SEMANGAT MENDIRIKAN SISTEM INI AWALNYA ADALAH TIDAK ADA LAGI DUALISME DAN PERBEDAAN PENGELOLAAN JURNAL ANTARA KEMENTERIAN RISTEKDIKTI DAN LIPI. NAMUN TERNYATA, HARAPAN TINGGALAH HARAPAN. MEREKA TETAP BERJALAN MASING-MASING, HINGGA KEDUANYA MENCIPTAKAN DUA SISTEM AKREDITASI DAN LEMBAGA PENGINDEKS BARU. LALU APA YANG SEBENARNYA TERJADI? BAGAIMANA SEBENARNYA HUBUNGAN DIKTI DAN LIPI?

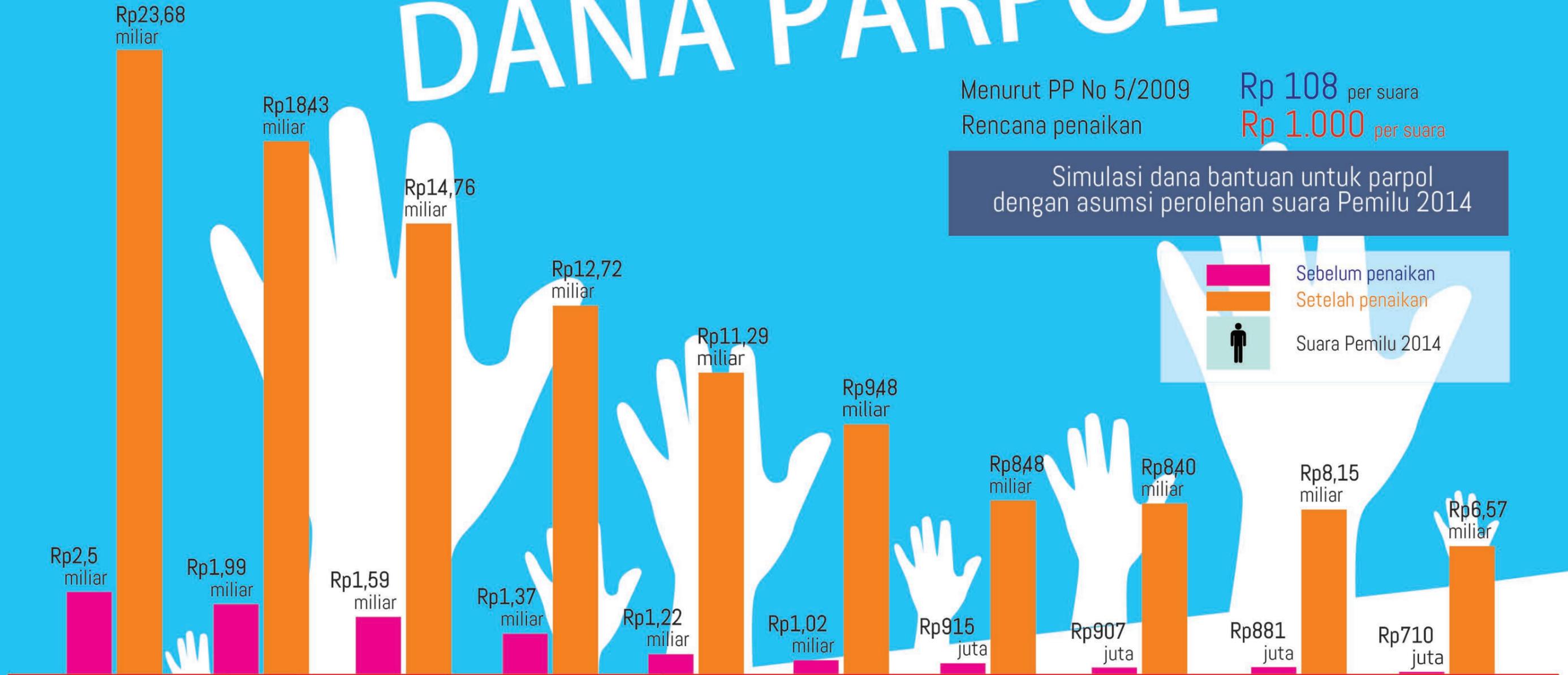


RENCANA PENAIKAN DANA PARPOL

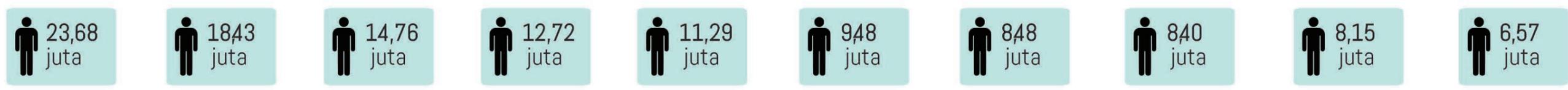
Menurut PP No 5/2009
Rencana kenaikan

Rp 108 per suara
Rp 1.000 per suara

Simulasi dana bantuan untuk parpol dengan asumsi perolehan suara Pemilu 2014



■ Sebelum penaikan
■ Setelah penaikan
■ Suara Pemilu 2014



RYAAS RASYID: KEMENDAGRI PERLU KAJI MODEL PEMBANGUNAN PERBATASAN

JAKARTA - Dalam seminar yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Demokrat tentang Pembangunan Daerah sebagai Beranda Depan NKRI, Pakar Otonomi Daerah Ryaas Rasyid menyarankan Kementerian Dalam Negeri mengkaji model pembangunan yang tepat untuk diterapkan di daerah perbatasan. Dalam kesempatan tersebut, Ryaas mencontohkan program Bupati Malinau yang sukses dengan program desa membangun. Program tersebut melibatkan masyarakat secara langsung. Kepala Desa di Malinau diberikan kewenangan layaknya Bupati, sehingga pembangunan bisa dilakukan dengan cepat.

"Seharusnya Kemendagri membuat kajian model pembangunan daerah perbatasan yang kemudian bisa diaplikasikan di daerah perbatasan lainnya. Contohnya seperti yang dilakukan Yansen Tipa Padan di Malinau, Kalimantan Utara, coba diundang oleh BPP Kemendagri untuk dikaji. Selama ini *kan* hanya melakukan kajian sendiri-sendiri," sarannya dalam pertemuan tersebut di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta.

Dalam acara yang dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo tersebut, Ryaas juga mengatakan perlu adanya legitimasi atau UU terkait perbatasan. Pasalnya selama ini perbatasan tidak pernah lepas dari isu keamanan, keterbelakangan, dan kesejahteraan masyarakatnya.

"Dengan UU perbatasan akan dikelola dengan baik, karena ada nomenklatur yang jelas. Perbatasan merupakan simbol utama kesejahteraan bangsa. Kesejahteraan perbatasan akan membuat negara semakin memiliki eksistensi," katanya.

Perbatasan merupakan bagian suatu negara yang saat ini membutuhkan perhatian dari pemerintah dan DPR. Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik menyarankan hal yang sama, menurutnya DPR perlu mengawal lahirnya UU Perbatasan. Erma juga menyarankan, agar BNPP tidak diurus oleh Kemendagri. Perbatasan menurutnya harus



menjadi perhatian penting pemerintah tidak hanya teori perbatasan sebagai garda terdepan bangsa.

"Banyak hal yang menjadi tantangan pemerintah terkait perbatasan, seperti minimnya pendekatan di berbagai sektor. Kemudian perlu direvitalisasi BNPP, kalau perlu dibuat setingkat Kementerian. Namun apabila itu tidak memungkinkan, maka BNPP bisa digabung dengan kementerian yang menangani daerah tertinggal. Kemendagri tidak cocok mengurus perbatasan, sebab sudah mengurus 500 daerah," ucap Erma.

Hal itu sejalan dengan pemikiran Ryaas. Menurut Ryaas kementerian yang menangani desa sebaiknya kembali ke Kemendagri. Selanjutnya BNPP bisa disatukan dengan daerah tertinggal. Perbatasan menurut Ryaas harus menjadi prioritas utama pembangunan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, sejak tiga tahun terakhir pemerintah Joko Widodo fokus membangun infrastruktur yang salah satunya adalah perhatian lebih pada daerah perbatasan. Tercatat selama menjabat telah meresmikan 9 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan akan terus dilakukan. "Hal itu tentu sejalan dengan Nawacita membangun Indonesia dari pinggiran. Target pengelolaan perbatasan pada

tahun ini yaitu membangun 10 pusat kegiatan strategis nasional, melakukan pembangunan di 150 kecamatan lokasi prioritas, serta membangun 7 PLBN terpadu dan kawasan pendukung PLBN.

Menurut Ryaas cita-cita menjadikan perbatasan sebagai garda terdepan bangsa semoga tidak hanya teori. Perlu ketegasan dan keseriusan pemerintah dalam mewujudkannya. Kesejahteraan masyarakat perbatasan menjadi kunci sebuah negara memiliki eksistensi. Pemerintah perlu melihat bagaimana keseriusan negara lain dalam membangun perbatasan.

"Presiden Amerika Donald Trump dan Mao Zedong pada 1969 menjadi contoh bagaimana pemerintah memberikan perhatian lebih kepada perbatasan meski menuai banyak kontroversi. Untuk memproteksi para pendatang dan imigran, Trump membuat kebijakan membangun tembok di sepanjang perbatasan Amerika dengan Meksiko. Begitu juga yang dilakukan Mao Ze Dong ketika Tiongkok terlibat konflik dengan Uni Sovyet. Tiongkok ketika itu berani menempatkan 1 juta prajurit di sepanjang perbatasan. Kedua pemimpin tersebut bisa menjadi contoh ketika bagaimana pemerintah memperlakukan perbatasan," tutup Ryaas. (MSR)

BPP KEMENDAGRI HADIRI FGD PENGEMBANGAN PORTAL ACCH KPK



JAKARTA - Cita-cita membumikan pengetahuan anti korupsi kepada masyarakat terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baru-baru ini KPK melakukan pengembangan *website Anti-Corruption Clearing House (ACCH)* dengan alamat acch.kpk.go.id. Menurut Kabiro Humas KPK, Yuyuk Indrawati dalam acara *Focus Group Discussion (FGD)* yang diselenggarakan di Gedung KPK, portal tersebut nantinya bisa difungsikan sebagai pusat pengetahuan dan diharapkan memberi rujukan bagi masyarakat untuk memroduksi pesan anti korupsi dengan berbagai sekmen.

"Semoga bisa dipakai sebagai pusat pengetahuan anti korupsi, FGD ini juga diharapkan bisa memberikan ide baru terkait pengembangan *website* dan bagaimana pengelolaan ke depannya," ucap Yuyuk di Gedung KPK, Kamis (14/9)

Acara FGD tersebut dipandu oleh Pakar Komunikasi Heru Hendarmoko. Selain itu, FGD juga dihadiri oleh lintas K/L, seperti LIPI, Kemitraan, media massa, pegiat anti korupsi, dll. Tidak ketinggalan turut

hadir juga dari BPP Kemendagri.

Heru mengatakan cita-cita yang digagas Humas KPK sangat besar, untuk itu menurutnya *website* tersebut perlu mendapat koreksi dari para tamu undangan. Salah satu peserta dari LIPI, Obing Katubi mengatakan agar bisa lebih dikenal masyarakat portal ACCH harus mendeklarasikan diri sebagai portal tertentu, pasalnya masih sangat luas dan tidak hanya menyajikan data. "Kalau memang sebagai rujukan data harus fokus ke situ," ucapnya.

Sementara itu beberapa peserta tidak hanya mengoreksi terkait nama ACCH yang kurang familiar di telinga masyarakat, namun juga mengoreksi konten dan tampilan yang ada di *website* tersebut. Peserta dari situs berita Kumaran mengatakan, dari sisi tampilan, *website* ACCH sangat menarik, namun kurang menarik ketika dibuka di *smartphone*.

"Kemudian trejadi pengulangan konten, antara di sub judul dengan ruang yang disediakan di tubuh

website, dari tampil juga, jika di *smartphone* itu sangat kepanjangan, saya kira itu kekurangannya," katanya.

Ilham Hamudy dari BPP Kemendagri menyarankan agar konten yang disajikan dalam portal ACCH tidak hanya menampilkan profil terkait orang-orang yang sudah menjadi tahanan, namun juga menampilkan para tersangka yang sudah ditetapkan namun belum ditahan dan tidak tahu keberadaannya.

"Saya rasa perlu juga ditampilkan orang-orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, yang tidak tahu kabarnya ke mana orang tersebut," tutur Ilham.

Atas acara tersebut Yuyuk sangat berterima kasih kepada para peserta yang sudah memberikan masukan terkait pengembangan *website* ACCH, yuyuk berharap *website* tersebut bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, tidak hanya untuk media massa, namun juga para pelajar, peneliti dan masyarakat terkait korupsi. (MSR)



RAKOR JURNAL BPP BERLANGSUNG MERIAH

JAKARTA – Sebagai induk dari BPP Daerah, BPP Kemendagri hadir sebagai fasilitator penyelenggaraan pelatihan Jurnal Ilmiah. Melalui Sub Bagian Perpustakaan, Informasi, dan Dokumentasi, acara Rapat Koordinasi (Rakor) Jurnal Ilmiah itu terselenggara dengan meriah pada Rabu (30/07) di Aula BPP.

Hadir sekira 80an peserta dari berbagai BPP Daerah dan Kemeneterian/Lembaga. Acara tersebut berlangsung secara meriah, kursi peserta masih tampak penuh hingga sesi akhir sekalipun. “Alhamdulillah, acara berjalan dengan lancar. Para peserta juga pada aktif bertanya,” kata Moh. Ilham. A. Hamudy, Ketua Panitia Rakor Jurnal.

Pemateri yang memberikan materi pun terlihat sangat interaktif, sehingga paparan yang disampaikan tidak membosankan para peserta. Seperti Lukman dari LIPI yang membawakan materi mengenai OJS (*Open Journal System*), Lukman menerangkan bagaimana urgensi

migrasi cetak ke *online*, sebagai eksistensi keberadaan jurnal untuk dibaca dan menjadi sitasi para peneliti lainnya. “Kalau Bapak/Ibu mencetak jurnal sudah habis sekira 40 miliar saja, dan itu hanya dibaca untuk 300 orang, tapi kalau *online*, yang baca bisa semua kalangan, baik dari dalam maupun luar negeri, dan biayanya rendah pula, tidak perlu menggunakan kertas,” terangnya.

Selain Lukman, hadir beberapa narasumber lainnya. Di antaranya, Dadan Ridwan Saleh (Pengelola Jurnal MEV) yang banyak memberikan materi mengenai perjalanan MEV dari awal hingga sekarang dikenal banyak orang, lalu ada Obing Katubi yang memberikan paparan mengenai gaya selingkung Jurnal Bina Praja.

Terlihat kerap kali pemaparan, bukan hanya satu dua yang bertanya tapi rata-rata penanya ada sekira 6-10 orang setiap sesi pemaparan. (IFR)



PLT. KEPALA BPP HADIRI WORKSHOP DI KALIMANTAN SELATAN

JAKARTA – Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri, Dodi Riyadmadji menghadiri acara workshop Litbang Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan itu Dodi dipilih sebagai narasumber yang akan memberikan paparan mengenai Sinergitas Lembaga Penelitian dan Pengembangan antar Provinsi, Instansi Vertikal Kab/Kota, Pusat dan pihak terkait lainnya. “Litbang harus berani meninggalkan zona nyaman, menjadi pioner perubahan, dan inovasi sektor publik,” kata Dodi.

Menurut Dodi, meski banyak sekali hambatan dan kendala dalam pembangunan daerah yang terjadi pada Litbang Daerah, seperti sarana prasana yang belum memadai, kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia), kurangnya koordinasi antar *stakeholder*, dan kurangnya pemanfaatan sumber daya secara berkualitas, semestinya ini menjadi tantangan yang bersinergi antar lembaga litbang untuk saling menguatkan dan membangun bersama lembaganya.

“Pembangunan daerah bisa dilaksanakan melalui tiga pilar: Pertama, dengan penguatan otonomi daerah melalui pemerintahan yang menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Kedua, di dunia pengelolaan SDM bisa membangkitkan

dunia usaha dengan mewujudkan pelatihan usaha mandiri sehingga tercipta lapangan kerja dan peningkatan pendapat. Ketiga, *good government* yang baik dengan menciptakan interaksi sosial, ekonomi, dan politik yang baik terhadap masyarakat,” jelasnya.

Lanjut Dodi, ia berharap dengan begitu, fungsi kelitbangan akan menjadi optimal dan menjadi tonggak dari berbagai lahirnya kebijakan yang efektif.

Empat hari setelah workshop tersebut, Plt. Kepala BPP Dodi juga menjadi moderator dalam acara Rapat Kerja Nasional Camat se-Indonesia di Semarang, Jawa Tengah.

Acara yang berlangsung selama tiga hari berturut-turut itu berlangsung sangat meriah. Seluruh peserta yang hadir, yakni Camat seluruh Indonesia terlihat aktif dalam acara yang bertemakan “Peran Strategis Camat dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Implementasi Koordinasi Wilayah dalam Menjaga Keutuhan NKRI”

“Camat merupakan salah satu pionir penting untuk menunjang sistem aparatur sipil negara,” kata Dodi.

Untuk itu, diharapkan setelah acara Rakornas ini berlangsung, Camat seluruh Indonesia menjadi aparat dan wadah yang efektif dan paling dekat dengan kepentingan masyarakat sekitar. Sehingga cita-cita pembangunan Nawa Cita yang digenjarkan oleh Presiden Joko Widodo dapat tercapai. (IFR)

PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH

IGA MEMASUKI TAHAP PENILAIAN

Program prioritas nasional Innovative Government Award (IGA) akan segera memasuki tahap penilaian. Penilaian tersebut akan dilakukan secara objektif terhadap 599 inovasi daerah yang sudah dipetakan oleh Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri. Ada pun Tim penilai melibatkan orang-orang dari beberapa Kementerian/Lembaga seperti LAN, Kemenristek dan Dikti, KemenPAN-RB, Universitas Indonesia, dan sebagainya.

Kepala Puslitbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri Rochayati Basra mengatakan perlu komunikasi lebih lanjut dan persamaan persepsi dengan para penilai, karena dalam waktu dekat Tim akan segera terjun ke lapangan untuk melakukan validasi terhadap 599 inovasi daerah yang sudah dipetakan.

Rochayati juga mengatakan dari 599 inovasi daerah yang sudah dipetakan nantinya akan diseleksi sehingga dapat dipilih 3 provinsi, 10 kabupaten, dan 10 kota yang siap bersaing memperebutkan peringkat atau juara.

Ketiga provinsi, 10 kabupaten, dan 10 kota kemudian akan diseleksi kembali. Para nominator tersebut akan diundang ke Jakarta. "Di hadapan para penilai, mereka akan memaparkan inovasi daerahnya dari sisi tata kelola, inovasi pelayanan publik, serta inovasi lainnya," tuturnya.

Ia menegaskan teknis penilaian akan dilakukan oleh 11 Tim penilai. Selain itu, untuk memudahkan para penilai tersebut, diperkenalkan *website* khusus terkait IGA, di dalamnya berisi *database* 599 inovasi daerah sebagai referensi bagi para penilai dalam melakukan penilaiannya.

Menurut Rochayati, penilaian tersebut merupakan kesepakatan yang sudah dilakukan antara Kemendagri dengan Kementerian/Lembaga, yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 800.2/4408/SJ tentang Kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemda Inovatif. Selain itu, Surat Edaran tersebut juga tengah didorong menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai dasar hukum IGA.

"Surat Edaran ini tengah didorong menjadi Permendagri, selain itu juga penilaian IGA bisa dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Dalam Negeri," ucapnya.

Kepala Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas LAN Marpaung mewakili Tri Widodo (Direktur Deputi Inovasi LAN) yang menjadi salah satu Tim Penilai IGA, mengapresiasi program tersebut, menurutnya IGA bisa menjadi salah satu kebanggaan untuk negeri. Marpaung mengatakan selama ini pemain utama penghargaan daerah baru ada dua yaitu LAN dengan Inagara Award, dan

SINOVIK Award oleh KemenPAN-RB. Marpaung berharap IGA juga menjadi bagian dari pemain utama selanjutnya, dan akan didorong, bahwa pemberian penghargaan akan mengerucut di Kemendagri. Namun, terkait IGA, Marpaung menyarankan penilaian harus lebih spesifik. Peralannya menurut Marpaung, beberapa inovasi daerah yang ada tidak semuanya baru, ada yang berasal dari hasil adopsi dan hasil adaptasi dari inovasi yang ada.

"Harus jelas kalau dari hasil adopsi dan adaptasi, diaopsi dari mana, kemudian alasannya, dan bagaimana cara mengaplikasikannya di daerahnya," sarannya.

Kemudian menurutnya perlu ada penyamaan persepsi dari seluruh Tim penilai, supaya beberapa aspek bisa dipertanggungjawabkan.

PP Inovasi Daerah

Penilaian IGA didasarkan pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lahirnya PP No 38 Tahun 2017 sekaligus menjadi dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan IGA selanjutnya. Selain itu, adanya PP tersebut diharapkan inovasi semakin tumbuh dan berkembang di daerah. Selama ini tidak sedikit daerah yang berurusan dengan hukum hanya karena melaksanakan inovasi. Regulasi tersebut diharapkan bisa menjadi acuan dalam berinovasi.

"Semoga dengan lahirnya PP ini bisa menjadi acuan daerah dalam mengembangkan inovasi," kata Dodi Riyadmadji Kepala BPP Kemendagri, dalam acara syukuran yang dilaksanakan BPP Kemendagri.

BPP Kemendagri juga diharapkan tidak hanya melahirkan PP Inovasi Daerah tetapi bisa membuat terobosan-terobosan baru untuk Kementerian Dalam Negeri. (MSR)



PUSAT LITBANG PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

KAJI TRANSAKSI NON TUNAI (CASHLESS)

Transaksi non tunai menjadi hal yang mendesak untuk diterapkan, khususnya di lingkungan pemerintahan. Peralannya, penerimaan negara dalam bentuk uang tunai menimbulkan kesempatan bagi pegawai, terutama yang langsung berhubungan dengan penerimaan uang seperti bendahara, maupun pembuat laporan kas, untuk melakukan penyelewengan, misalnya dalam bentuk pencurian atau manipulasi laporan. Hal ini dapat terjadi karena uang tunai paling mudah atau rawan disalahgunakan.

Hal itu pula yang menjadi dasar Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah BPP Kemendagri yang dikepalai oleh Sastri Yunizarti Bakry untuk mengkaji dampak pelaksanaan transaksi non tunai (*cashless*) terhadap efisiensi belanja daerah.

Menurut Sastri, *cashless* dimaksudkan agar pengelolaan keuangan tidak hanya berjalan baik, namun seoptimal mungkin dapat bermanfaat bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan baik pusat maupun daerah yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat. "Kondisi saat ini, sesuai dengan pengalaman saya sendiri sebagai pemeriksa, dalam pengelolaan keuangan masih ditemukan banyak penyimpangan yang berujung pada praktik korupsi," kata Sastri.

Ucapan Sastri sejalan dengan FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) yang menyatakan masih banyak penyelewengan dana APBD di seluruh Indonesia. Penyelewengan tersebut umumnya terjadi dari sektor infrastruktur. FITRA menyebutkan beberapa modus yang sering dilakukan pemerintah daerah seperti *mark up*, *mark down*, laporan fiktif, penyalahgunaan wewenang, dan penggelapan.

Sastri menambahkan pusat yang dipimpinnya saat ini fokus mengkaji hal tersebut, sehingga bisa melahirkan rekomendasi penerapan *cashless* di pemerintahan baik pusat maupun daerah. "Kita tidak bisa lagi dengan tunai. Misalnya kita mau perjalanan dinas, tentu akan kerepotan jika harus uang *cash*, atau berhubungan dengan pihak ketiga tidak harus dengan tatap muka. Kalau masih dengan manual harus menghitung dan sangat rawan penyalahgunaan. Kemendagri sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan daerah, harus menjadi pionir dalam pelaksanaannya," tuturnya.

Salah satu model daerah dengan efektivitas pengelolaan anggaran karena menerapkan *cashless* adalah Provinsi DKI Jakarta. Sejak 2014, DKI telah menerapkan *cashless* dan telah membawa dampak pada efisiensi belanjanya. Menurut Sastri kajian mengenai *cashless* tersebut sangat penting untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pelaksanaan transaksi non tunai dalam belanja daerah di DKI. Setelah diketahui nanti *kan* bisa dijadikan pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia untuk menerapkannya. Kemudian kajian juga tidak hanya bagaimana pelaksanaannya, namun juga apa dampak dari *cashless* itu?" tambahnya.

Transaksi non tunai sejalan dengan Instruksi Presiden No 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017. Inpres tersebut mendorong percepatan implementasi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Regulasi tersebut menurut Sastri perlu diperkuat dengan komitmen pimpinan di

masing-masing instansi pemerintah bersama seluruh jajarannya untuk melaksanakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangannya. Selain itu ia juga berharap ada penyusunan regulasi pendukung pelaksanaan transaksi tersebut, seperti mekanisme belanja barang dan jasa tertentu, mekanisme dan besaran uang persediaan, dan pembatasan transaksi tunai yang diperbolehkan.

Peralihan sistem transaksi dari tunai ke non tunai, membutuhkan perencanaan matang, sehingga perlu disusun *grand design* dan sumber daya manusia yang dipersiapkan dalam hal teknis pengelolaan keuangan. Di sisi lain, perlu juga menjalin kerja sama dengan perbankan sebagai mediator dalam transaksi dan penyedia barang dan jasa.

Sastri mengatakan transaksi *cashless* bisa dimulai sesegera mungkin dari BPP Kemendagri sendiri, dari hal yang bisa dilakukan seperti uang perjalanan dinas, pembelian ATK, konsumsi, honorarium, dan sebagainya. Ia pun optimis program tersebut bisa diimplementasikan pada 2018 mendatang. (MSR)



Pusat Litbang Adwil, Pempdes, dan Kependudukan

TERAPKAN KONSEP EKONOMI KREATIF SATU DESA = SATU PRODUK

Bidang Administrasi Kewilayahan, Pusat Litbang Administrasi Wilayah, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan akan melahirkan kegiatan untuk merumuskan konsep kebijakan ekonomi kreatif di daerah.

Konsep ekonomi kreatif yang dicanangkan oleh Hasudungan Hutauruk dan Tim nya itu, diharapkan akan menjadi cikal bakal pembangunan ekonomi bangsa mulai dari beberapa daerah. Program ini merupakan salah satu program penting yang diselenggarakan oleh Bidang Adwil untuk menelisik bagaimana potensi setiap daerah yang harus didukung pemerintah sepenuh hati sehingga dapat berkembang menjadi daerah yang maju, mandiri, dan siap bersaing di kancah nasional maupun internasional.

Hasudungan mengatakan, Dari budaya itu, Hasudungan berharap ada satu produk dalam satu daerah. "One village, one product" itulah yang mau kami bangun," terangnya.

Rencananya, ada tiga lokus kajian yang ingin diterapkan Hasudungan dalam membangun konsep kebijakan ekonomi kreatif di daerah, yakni Kota Bandung, Kabupaten Pangleng, dan Kota Pekalongan. Diaku Hasudungan dan Tim, memang dari tiga daerah yang ingin dibangun ekonomi kreatifnya itu memuyai ciri khas yang berbeda-beda, dan itulah yang menjadi tantangan baginya dan tim untuk gigih melakukan riset dan kajian terhadap

tiga daerah itu.

"Kami sudah mengunjungi tiga daerah itu, dan semuanya memang unik, ada yang memang secara teknis sudah maju, ada yang sedang berkembang, dan bahkan ada yang tidak didukung oleh pemerintah setempat. Memang sangat disayangkan jika ada daerah yang demikian, maka dari itu inilah yang ingin kita bangun," jelasnya.

Seperti di Kota Bandung, sistem tata kelola, pemukiman, dan bisnis ekonominya sudah cukup maju dengan hadirnya *good government* dan *leadership* yang bagus. Lalu di Kota Pekalongan ada batik yang sudah cukup maju dan berkembang bahkan di kancah internasional. "Di Pekalongan itu orang Arab Saudi sampai mencari bahan pokoknya, China yang memasarkan, dan orang lokal yang membuat. Jadi ada upaya penjangkauan dan integritas di sini yang semestinya terkoneksi dengan baik," ungkapnya.

Namun lain halnya dengan Kabupaten Pangleng, yang mayoritas masyarakatnya adalah nelayan (karena daerahnya mayoritas laut). "Di sana ada semacam kulit kerang yang bisa dijadikan hasil kesenian yang cantik, namun kurang adanya modal dari pemerintah. Memang sangat disayangkan, dan itulah yang mau kita sasar. Semoga dengan kajian dan penelitian

kita ini, daerah-daerah seperti Pangleng, Bandung, dan Pekalongan dapat bantuan secara penuh oleh pemerintah terutama Kementerian Dalam Negeri," tutupnya. (IFR)

"KONSEP EKONOMI KREATIF YANG AKAN DIBANGUN JUGA TIDAK BISA TERLEPAS DARI KHAS BUDAYA MASING-MASING SEHINGGA NUANSA KE-INDONESIA-AN JUGA BISA TERANGKAT DAN TERKENAL DI KALANGAN NEGERI SENDIRI MAUPUN NEGERI ORANG.



Pusat Litbang Otda dan Polpum

LEADERSHIP AWARD TETAPKAN KRITERIA KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH

Setelah beberapa kali merapatkan penilaian penghargaan kepemimpinan kepala daerah, hasil kajian mengenai penilaian *leadership award*, Puslitbang Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum mulai menetapkan beberapa indikator penilaian *Leadership Award*

Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum mulai menyepakati kategori penilaian untuk program nasionalnya *Leadership Award* 2017.

Berdasarkan hasil rapat ke-6 yang diawali paparan Syabnikmat Nizam, Kapuslitbang Otda, Polpum tentang Penilaian Penghargaan Kepala Daerah terkait dengan input prestasi kinerja Berbasis Manajemen dengan 8 indikator, inovatif dengan 5 indikator dan Rekam Jejak dengan 7 indikator.

Namun selanjutnya setelah ada masukan dan saran Pakar/Narasumber dan peserta rapat FGD yang diselenggarakan pada 12-13 September 2017 lalu di Hotel Acacia, Puslitbang Otda Polpum, menyepakati 2 aspek/Variabel yaitu, aspek prestasi kinerja berbasis manajemen dengan 10 indikator dan rekam jejak (penghargaan, reputasi dan bebas hukum) dengan 6 indikator.

Adapun dari aspek kepemimpinan sosial mengerucut menjadi 6 kriteria yang menjadi kategori pemilihan *Leadership Award*. di antaranya jujur dan transparan, disiplin, tanggung jawab, toleransi, goong royong, dan santun. Menarik, karena dalam aspek tersebut terdapat variabel toleransi, menurut Syabnikmat ada beberapa indikator dalam Toleransi seperti apakah kewajiban pemimpin memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam menjalankan ibadah atau aktivitas keagamaan sesuai kepercayaan yang dianutnya, serta melakukan aktivitas sosial sesuai dengan suku, ras, budaya, dan gender masyarakat yang di pimpinnya.

"Selain itu, dalam indikator toleransi juga dilakukan penilaian apakah kepala daerah mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan konflik, bersedia mendengarkan aspirasi rakyat dari berbagai kelompok sosial, serta memberikan contoh konkret baik dalam tutur kata dan tindakan dalam kebhinnekaan," tuturnya.

Selain kepemimpinan sosial, *Leadership Award* juga menetapkan aspek kepemimpinan sosial yang terdiri dari 5 variabel yaitu visioner (berwawasan), kapabilitas, akseptabilitas, integritas, dan gaya kepemimpinan.

Sebagai contoh dalam variabel visioner, indikator penilaian seperti kemampuan seorang pemimpin atau kepala daerah dalam merumuskan visi dan misi yang dibutuhkan rakyat secara jelas, serta mampu mejabarkan visi misi dalam operasional kerja yang terukur.

Contoh lain dalam hal gaya kepemimpinan, kepala daerah akan dinilai dari sisi apakah mereka mampu membangun iklim kerja yang saling percaya dengan bawahan, menghargai pendapat mayoritas staf dan tidak memaksakan kehendak, kemampuan mengambil keputusan yang tepat dalam keadaan mendesak, dan sebagainya.

"Untuk Responden disepakati kami akan mendapatkan data yang *valid* dan *up to date* dalam Pedoman penilaian kepemimpinan kepala daerah. Kami nantinya akan mencari informan yang kontra terhadap KDH antara lain: Parpol di luar koalisi, unsur pimpinan daerah, perguruan tinggi, tokoh agama dan ormas/LSM. Beberapa indikator yang ditetapkan juga terdapat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 002.6/4728/SJ tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah" tutupnya. (IFR)





LAPORAN UTAMA

SENGKARUT SISTEM AKREDITASI JURNAL

FEBRUARI 2016 LALU, *MEDIA BPP* PERNAH MENYUGUHKAN LAPORAN UTAMA TERKAIT AKREDITASI NASIONAL DENGAN SISTEM SATU PINTU ATAU YANG DIKENAL DENGAN ARJUNA (AKREDITASI JURNAL NASIONAL). SEMANGAT MENDIRIKAN SISTEM INI AWALNYA ADALAH TIDAK ADA LAGI DUALISME DAN PERBEDAAN PENGELOLAAN JURNAL ANTARA KEMENTERIAN RISTEKDIKTI DAN LIPI. NAMUN TERNYATA, HARAPAN TINGGALLAH HARAPAN. MEREKA TETAP BERJALAN MASING-MASING, HINGGA KEDUANYA MENCIPTAKAN DUA SISTEM AKREDITASI DAN LEMBAGA PENGINDEKS BARU. LALU APA YANG SEBENARNYA TERJADI? BAGAIMANA SEBENARNYA HUBUNGAN DIKTI DAN LIPI?

Pada April 2016 LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan Kemenristekdikti (Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi) menyiapkan sebuah sistem akreditasi berbasis satu pintu, atau yang biasa dikenal Akreditasi Jurnal Nasional (ARJUNA). Sistem inilah yang menjadi jawaban dari beragam pertanyaan kisruh antara LIPI dan Dikti yang selama ini berjalan masing-masing.

Wahid Nashihuddin, Manajer Layanan Perpustakaan PDII – LIPI dalam Media BPP edisi Februari 2016 pernah mengatakan, Arjuna sebetulnya merupakan sistem penyeragaman aturan penilaian dari ke dua lembaga besar akreditasi jurnal, yakni LIPI dan Dikti.

LIPI menilai jurnal di bawah naungan Kementerian dan Lembaga, sementara Kemenristek Dikti menilai jurnal di bawah naungan Perguruan Tinggi. “Dalam sistem tersebut nantinya akan ada pilihan dari masing-masing lembaga. Akan ditunjukkan kepada siapa? LIPI kah? Atau Kemenristekdikti? Sesuai dengan lembaga naungan masing-masing. Tentunya hal tersebut memiliki kajian yang berbeda. Artinya, Arjuna memiliki satu kepala dengan kewenangan berbeda. Kita bekerja sama dan sudah sepakat peraturannya sama,” kata Wahid dalam arsip Media BPP edisi Februari 2016

Sewaktu Media BPP temui dulu, LIPI dan Kemenristekdikti memang tengah melakukan persiapan pengembangan sistem Arjuna yang masih dalam proses penyempurnaan. Pada saat itu, portal *arjuna.dikti.go.id* memang masih berupa tampilan sederhana yang belum memuat banyak konten yang

dicita-citakan. Namun, belakangan, para pengelola jurnal pun banyak bertanya, mengapa kebanyakan yang berkontribusi dalam portal Arjuna hanya jurnal di bawah naungan Kemenristek Dikti atau jurnal milik Perguruan Tinggi. Sementara jurnal di bawah naungan LIPI belum banyak dalam sistem Arjuna.

Tak mau kalah

Sistem Arjuna kemudian terus melakukan penyempurnaan, hingga banyak jurnal ilmiah yang berkualitas terpampang dalam portal tersebut. Arjuna kemudian semakin mengembangkan sayap dengan diluncurkan portal pengindeks bernama SINTA (*Science and Technology Index*) sebuah portal yang berisikan lembaga pengindeks jurnal nasional seperti halnya Scopus atau Google Scholar. Rata-rata jurnal yang masuk dalam SINTA ini merupakan jurnal yang sudah terakreditasi dalam Arjuna.

Setelah mendengar hal tersebut, belakangan para pengelola jurnal ilmiah di bawah naungan akreditasi LIPI kemudian diundang untuk merumuskan rencana pengelolaan lembaga pengindeks yang dibuat oleh LIPI sendiri pada Mei 2017. LIPI berencana menamakan lembaga akreditasi jurnal itu dengan sebutan SITASI (Sistem Informasi Akreditasi) atau di antara mereka juga menyarankan menamakan dengan sebutan SIAMI (Sistem Akreditasi Majalah Ilmiah). Lipi juga menyiapkan lembaga pengindeks jurnal dengan nama *Indonesia Science and Technology Index* (InaSTI). Tim Media BPP pun lantas mencoba mendatangi mereka satu per satu untuk meminta penjelasan, ada apa sebenarnya antara LIPI dan Dikti, mengapa mereka secara masing-masing membuat sistem pengindeks dan sistem akreditasi yang berbeda, bukankah semangat Arjuna adalah menyatukan yang telah lama berpisah? Kami pun lantas mencoba menghubungi berbagai pihak yang bersangkutan, baik dari LIPI maupun dari Dikti.

Menurut Kapusbindiklat LIPI, Dwi Eny Djoko Setyono sebenarnya SIAMI baru nama sementara, LIPI belum *melaunching*-nya secara resmi. “Kita punya sistem aplikasi sendiri, karena kita belum sepakat menggunakan Ar-

“HUBUNGAN ANTARA DIKTI DAN LIPI BAGAIKAN SEORANG PASANGAN YANG BERCERAI SEBELUM KAWIN. ARTINYA BELUM SELESA PEMBAHASAN ARJUNA INI, TAPI SUDAH BERPISAH DULU

juna,” terangnya.

Menurut pria yang akrab disapa Djoko itu, inisiasi pendirian SIAMI ini sebenarnya keinginan kuat LIPI untuk memunyai lembaga pengindeks tingkat nasional setelah adanya ketidaksepakatan dengan Arjuna. “Secara nasional kita inginnya punya sistem sendiri. Sebelumnya saya dan teman-teman ikut menggodok masalah Arjuna bersama Dikti. Kami dari LIPI sebenarnya tidak masalah apabila ada penggabungan seperti Arjuna, siapa pun jurnal yang terakreditasi akan diakui. Tapi sebaliknya, oleh Dikti, jurnal yang diakreditasi di bawah naungan LIPI tidak dihargai penuh, makanya kemudian dibuatkan Arjuna untuk penyatuan. Namun, ternyata saat penggodokan itu ada masalah,” ceritanya.

Lanjutnya, permasalahan itu menurut Djoko disebabkan oleh keinginan kuat dua lembaga yang tidak menemukan titik kesepakatan, terutama di tingkat bawah (eselon II, III dan IV). “Para pimpinan Eselon I semua sepakat. Tapi terkendala pada permintaan Dikti. LIPI hanya minta yang menjadi ketua tim akreditasi itu dari kepala LIPI. Karena yang mengeluarkan Peraturan Menteri tentang Sistem Akreditasi itu dari Ristekdikti, yang menandatangani semestinya kepala LIPI. Jadi kami bertanggung jawab terhadap tim penilai. Tidak perlu ada sistem pemilihan kepala, biarkan LIPI yang mengeluarkan sertifikatnya. Sempelnya *sih*, Permen (Peraturan Menteri) *kan* yang mengeluarkan

sudah Dikti, bagus ya bagi-bagi lah. Dikti Permen, LIPI yang menandatangani sertifikat. Tapi mereka keinginnya ketua dipilih berdasarkan pemilihan. Kami mau setidaknya Dikti memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap kami, makanya itu yang menyebabkan sampai sekarang tidak menemukan titik terang. Tapi terakhir saya dapat info, Arjuna ini akan mulai dibicarakan lagi untuk penyatuan, mungkin karena mereka (Dikti) dengar kita bikin SIAMI jadi mereka tidak enak,” jelasnya.

Dua keinginan

Dari keterangan Djoko tersebut, ia bahkan menyebutkan hubungan antara Dikti dan LIPI bagaikan seorang pasangan yang bercerai sebelum kawin. “Artinya belum selesai pembahasan Arjuna ini, tapi sudah berpisah dulu,” kekehnya.

Permohonan pihak LIPI untuk menjadi ketua diakui Djoko memang sebagai wujud untuk menghargai keberadaan LIPI yang selama ini berada dibawah naungan akreditasinya selama ini dipandang sebelah mata. Dalam proses pengajuan angka kredit penulis, Dikti tidak mengakui jurnal ilmiah yang berada di bawah naungan LIPI. “Saya ti-

tidak tahu kenapa Dikti tidak mengakui. Supaya kedua-duanya mengakui itulah kenapa Arjuna dibuat. Istilahnya rumah *kan* satu atap, tapi susah menyatukan. Sudah bersaudara harusnya satu suara tapi susah bersatu,” paparnya.

Hal itu dibenarkan oleh M. Nurul Furqon, Kasubid Akreditasi Pusbindiklat Peneliti LIPI. Dia ingat betul bagaimana rapat terakhir antara LIPI dan Dikti dalam merancang Arjuna pada 16 Agustus 2016. “Masing-masing punya tuntutan, saya tidak bisa bilang secara detail apauntutannya, yang pasti harapan saya masing-masing bekerja dengan sebaik-baiknya dan professional,” terangnya saat dihubungi Media BPP

Namun berbeda dengan Djoko, Furqon mengatakan justru perbedaan pendapat terjadi di antara pimpinan tertinggi dua lembaga, eselon I pasca-bergantinya pimpinan LIPI ini (pasca wafatnya Iskandar Zulkarnaen), Furqon berharap ada kekuatan besar yang bisa menyatukan. “Kami sudah saling mengupayakan untuk bersatu, tapi mentok di tingkat pimpinan dan beberapa kebijakan, tapi kalau saya tidak salah dengar ada



wacana disatukan lagi pada 2018. Mudah-mudahan dengan *good will* pimpinan masing-masing institusi ada titik terang di tahun yang akan datang, nantinya hanya ada satu lembaga akreditasi jurnal di Indonesia,” imbuhnya.

Pernyataan Furqon dan Djoko ini yang membuat Tim Media BPP lantas menyambangi Kemenristek Dikti untuk mencari tahu kebenarannya. Kami kemudian bertemu dengan Sadjuga (Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual Kemenristek Dikti) dan stafnya Suwitno.

Pada kesempatan itu, kami mencoba memastikan apakah betul terjadi dua keinginan di tingkat eselon II, III, dan IV. Suwitno dengan heran menjawab, bahwa perbedaan pendapat itu justru terjadi di tingkat pimpinan. “Keinginan LIPI itu *kan* ingin menjadi ketuanya, dari kami tidak bisa. Kalau sudah disatukan jangan ada lagi disebut LIPI atau Dikti tapi diksinya cukup nasional saja,” terangnya.

Hal itu dibenarkan oleh Sadjuga yang duduk di sebelahnya, dua keinginan kuat itu yang saling mempertahankan prinsipnya, keputusan inilah yang membuat Dikti akhirnya meninggalkan LIPI untuk mengembangkan Arjuna secara mandiri. “Ya karena tidak ada kesepakatan, akhirnya kita membangun saja Arjuna sendiri,” paparnya. (IFR)



LAIN LIPI BEDA KEMENRISTEKDIKTI

Permasalahan selanjutnya dari LIPI dan Dikti bukan hanya mendirikan lembaga akreditasi yang berjalan masing-masing. Tapi yang lebih besar adalah terkait pengakuan dua jenis jurnal yang berada di naungan masing-masing.

Para pengelola jurnal kerap bingung apabila membuka peluang kesempatan menulis di jurnalnya atau yang biasa dikenal dengan istilah *call for paper*, seringkali dipertanyakan oleh peneliti dari kalangan akademisi apakah jurnal yang dikelolanya terakreditasi LIPI atau Dikti. Seperti Moh. Ilham A. Hamudy, pengelola Jurnal Bina Praja BPP (Badan Penelitian dan Pengembangan) Kemendagri yang seringkali ditanyakan oleh calon penulis jurnalnya tentang siapa lembaga pengakreditasi jurnalnya. "Ada beberapa teman saya yang dosen di perguruan tinggi, dia bertanya apakah jurnal Anda terakreditasi LIPI atau Dikti. Saya bingung, dan setelah saya cari tahu rupanya jurnal yang terakreditasi LIPI itu tidak diakui saat proses pengajuan angka kredit peneliti ketika hendak mengajukan kenaikan pangkat," bebarnya.

Beda angka kredit

Perbedaan itu jelas, terutama bagi golongan akademisi yang banyak

berkontribusi menulis di jurnal ilmiah. Untuk artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi LIPI dan Dikti secara nasional biasanya bernilai 25 poin sementara yang belum terakreditasi bernilai 5 poin (LIPI), sedangkan Dikti 10 poin. Namun sayangnya, memang ada beberapa keganjilan antara dua lembaga tersebut. Dikti tidak mengakui jurnal terakreditasi LIPI untuk pengajuan angka kredit, namun LIPI mengakui akreditasi dari Dikti, meskipun secara pengajuan akreditasi syarat-syaratnya hampir sama. "Dari dulu pengakuan Dikti terhadap LIPI tidak setara. Jurnal akreditasi LIPI itu tidak diakui Dikti, padahal sangat menguntungkan peneliti," kata Dwi Eni Djoko Setyono, Kapusbindiklat LIPI

Hal itu dibenarkan oleh Sadjuga, Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual Kemenristek Dikti, ia pun sendiri menyadari, sebelum atau setelah adanya Arjuna memang pengakuan angka kredit memang berbeda. "Sejak kapan ya? Sejak zaman nenek moyang kayaknya," seloroh sambil tertawa.

Sebenarnya Sadjuga dan Suwitno pun bingung mengapa bisa dibedakan. "Hal itu yang berwenang adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai pedoman pengajuan angka kredit. Kami pun sering dikomplain, kenapa jurnal akreditasi Dikti masih ada yang jelek dan sebagainya. Lagi pula apa yang sudah terakreditasi di kami juga belum tentu mendapatkan poin 25, bisa kurang atau pas segitu. Karena poin tersebut bukan penilaian mutlak, hanya sebagai patokan saja," jelasnya.

Ia melanjutkan, sebenarnya untuk lebih jelasnya, aturan tersebut tertuang dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

M. Nurul Furqon, Kasubid Akre-

ditasi Pusbindiklat Peneliti LIPI, membenarkan hal tersebut, bahwa dalam PO (Pedoman Operasional) itu penilaian angka kredit kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen dijelaskan salah satunya adalah pernah menulis di jurnal terakreditasi nasional. "Nah, yang dimaksud dengan terakreditasi nasional dalam PO itu dibunyikan bahwa akreditasi yang diakui dari Pengelolaan Kekayaan Intelektual Kemenristek Dikti, bukan dari siapa pun termasuk LIPI. Jadi akreditasi kami tidak diakui pada PO itu" terangnya.

Memang, dalam PO tersebut berbunyi bahwa jurnal nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status

terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. "Terus terang, dalam hal ini pada saat terakhir rapat Agustus kemarin, Dikti merasa kecolongan, jadi cita-cita Arjuna juga terhambat karena adanya peraturan tersebut," jelasnya.

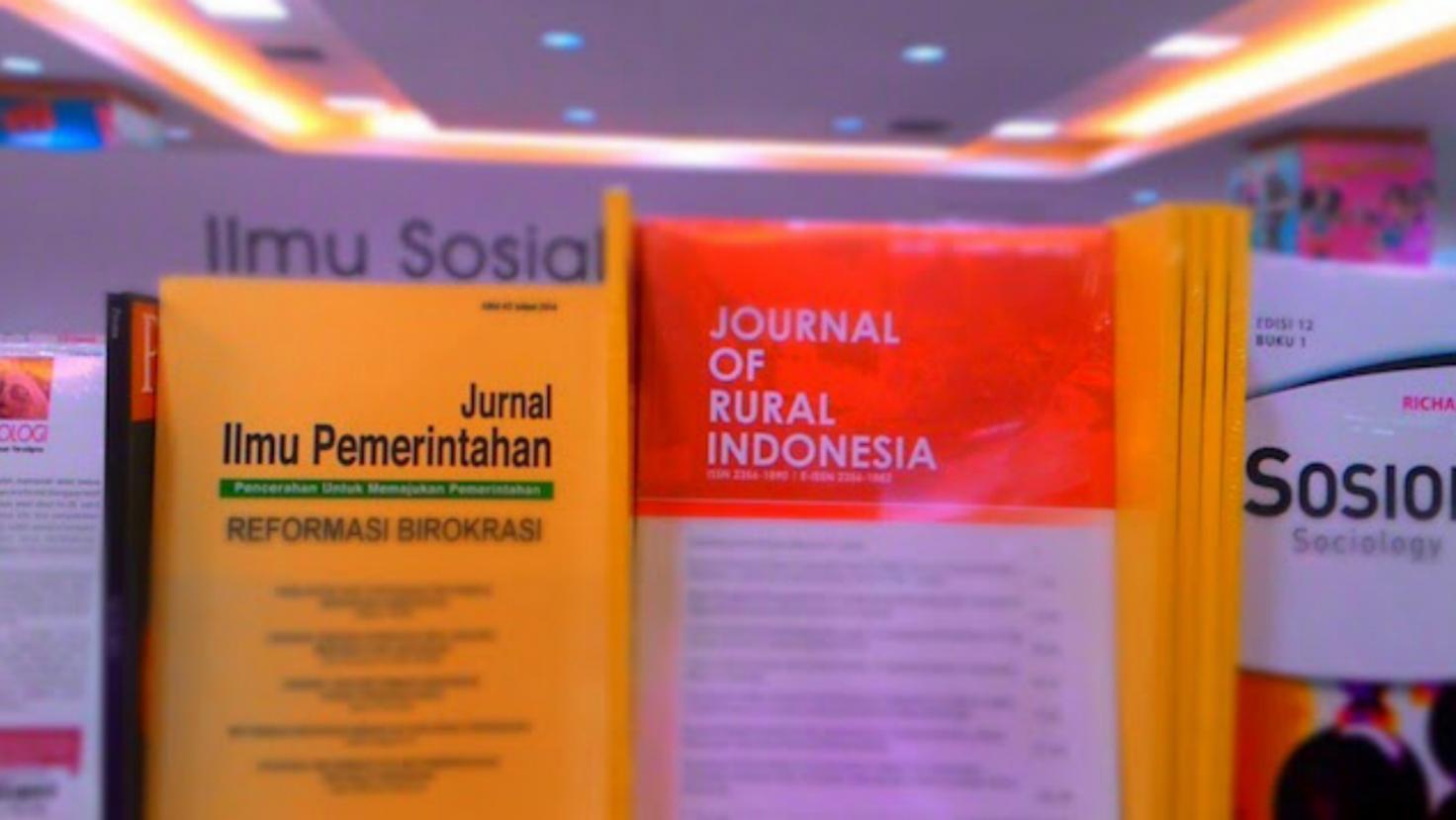
Sebetulnya, baik dari pihak Dikti maupun LIPI pun sudah menyarankan agar beberapa persoalan seperti angka kredit diatur lebih lanjut dalam peraturan Kemenristek Dikti. Sebab, peraturan tersebut tertuang dalam Kementerian yang berbeda, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kementerian yang akhirnya meleburkan diri dengan Kemenristek Dikti di era Presiden Joko Widodo).

Menurut Suwitno, Dikti pun hingga kini masih menggunakan pedoman akreditasi yang lama, dan sedang merancang peraturan menteri yang baru terkait akreditasi. Namun, saat *Media BPP* membaca *draft* Permen per September 2017 yang diberikan oleh Suwitno dan Sadjuga, ternyata isi *draft*nya sama sekali tidak menyinggung soal akreditasi di bawah naungan selain Kemenristek Dikti.

Seperti pada Pasal 5 *Draft* Permen tentang Akreditasi Jurnal tersebut menyebutkan, "Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Direktur Jenderal" dalam hal ini adalah Kemenristek Dikti. Itu artinya, dalam kesempatan tersebut, Dikti memang tidak ada niat untuk mengakui jurnal terakreditasi di bawah naungan LIPI.

"Tapi memang kami akan menguji publik *draft* ini pada Oktober mendatang, tentu kami menerima segala masukan dan kritik pada saat proses penyempurnaan Permen





AGAR PENGELOLA JURNAL TIDAK BIMBANG

ini,” imbuh Sadjuga.

Sementara itu, Furqon menilai, ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari sistem penilaian angka kredit yang berbeda ini. Kekurangannya justru banyak merugikan jurnal terakreditasi LIPI. “Pertama angka kredit peneliti tidak diakui, lalu kedua, untuk para pengelola jurnal terakreditasi LIPI tentu akan kesulitan mencari naskah/artikel dari akademisi, karena mereka lebih suka mengirim artikelnya ke jurnal terakreditasi Dikti. Sementara para pengelola jurnal Perguruan Tinggi yang terakreditasi Dikti tentu akan sangat diuntungkan dengan memperoleh naskah sebanyak-banyaknya. Karena artikel yang dikirimkan ke Dikti, itu juga diakui di LIPI kredit poinnya, yakni sama-sama 25,” paparnya.

Dua akreditasi

Perbedaan angka kredit ini tentu banyak menimbulkan kegelisahan bagi para pengelola jurnal terakreditasi LIPI juga dan mungkin peneliti baru di kalangan akademisi.

Maka tidak heran, beberapa jurnal terakreditasi LIPI yang sudah mapan kerap berbondong-bondong ikut mendaftarkan diri terakreditasi Dikti, dengan beragam alasan seperti, agar reputasi jurnalnya lebih baik, sehingga peminat peneliti untuk mengirimkan naskah semakin banyak.

Menurut Sadjuga, di Indonesia hanya ada 4 jurnal yang sudah terakreditasi LIPI dan Dikti, salah satunya adalah MEV Journal. Dalam

“DIKTI TIDAK MENAKUI JURNAL TERAKREDITASI LIPI UNTUK PENGAJUAN ANGKA KREDIT, NAMUN LIPI MENAKUI AKREDITASI DARI PENGAJUAN AKREDITASI SYARAT-SYARATNYA HAMPİR SAMA. DARI DULU PENGAKUAN DIKTI TERHADAP LIPI TIDAK SETARA. JURNAL AKREDITASI LIPI ITU TIDAK DIAKUI DIKTI, PADAHAL SANGAT MENGUNTINGKAN PENELITI

kesempatan Rakor Jurnal yang diadakan Sub Bagian Perpustakaan, Informasi, dan Dokumentasi, pengelola MEV Journal, Dadan Ridwan Saleh mengatakan, memang jurnal ini sebetulnya menjadi ‘kelinci percobaan’ dua lembaga besar seperti LIPI dan Dikti. “Pada saat itu kami memang menjadi salah satu jurnal yang pertama kali mendapat dua akreditasi, Ada kami dan Jurnal Atom. Tapi secara menyeluruh persyaratan akreditasi hampir sama, hanya soal pengakuannya saja. Tapi untuk mencapai itu semua, kami memang banyak berjuang, dan pada akhirnya kami banyak mendapatkan naskah dari beragam kalangan, baik itu dosen, peneliti di kementerian dan lembaga, dll,” jelas Dadan.

MEV Journal memang jurnal yang termasuk tua di kancah dunia penelitian. Usianya sudah menginjak 7 tahun, dan banyak sekali tulisan-tulisan yang berkualitas hadir dalam jurnal yang kini telah berbahasa Inggris itu. (IFR)

Di tengah terombang ambingnya sistem pengakuan akreditasi jurnal ilmiah yang tidak diakui oleh Dikti, tentu yang menjadi keresahan dan korban adalah para pengelola jurnalnya. Namun, Lukman peneliti LIPI menyarankan, pengelola jurnal tidak perlu bimbang dengan sistem akreditasi keduanya.

“Saat ini untuk pengelola jurnal tidak perlu bingung, yang penting objek dinilainya sama, jadi mau akreditasi LIPI atau Dikti tidak masalah. *Toh* instrumennya sama. Kita juga sambil menunggu permenristekdikti untuk akreditasi jurnal terbaru ada yang saat ini sedang disusun oleh Dikti, semoga memang ada angin segar bagi pengelola jurnal akreditasi LIPI,” sarannya.

Menurut Lukman, SINTA lahir karena ISJD (Scientific Journal Database yang dikelola oleh LIPI) sebelum akhirnya berjalan masing-masing, sementara SIAMI dan Inasti (LIPI) yang ada saat ini belum berjalan optimal.

“Daftar keduanya juga silahkan, namun di kalangan perguruan tinggi masih ada perbedaan persepsi tim penilai, jadi untuk mengatasi hal tersebut amannya dua akreditasi. Saat ini sudah ada 4 jurnal dengan dua akreditasi contohnya dari LIPI ada MEV Batan, Jurnal Atom, Jurnal Kehutanan, dan Wallacee. Yang penting jurnal dikelola sesuai dengan Perka LIPI ataupun Perdirjen Dikti,” imbuhnya.

Memang diakui Lukman, ada penilai yang belum memahami terkait kredit poin yang dinilai dari keduanya. “Peneliti yang mengajukan angka kredit dan belum paham hal tersebut sebenarnya tidak salah juga, pasalnya aturan di juknis masih mengacu pada aturan lama dari Permendikbud belum diubah termasuk untuk akreditasi jurnal belum ada di Permen Ristek Diktinya, jadi saat ini LIPI dan Kemenristek Dikti mengacu pada aturan yang ada. Yang harus dibenahi adalah peraturan terbaru terkait akreditasi jurnal (permen ristek dikti) harus segera

keluar untuk menjembatani masalah-masalah tersebut,” terangnya.

Hal itu diamini oleh M. Nurul Furqon, Kasubid Akreditasi Pusbindiklat Peneliti LIPI, bahwa saat ini kedua lembaga telah bekerja dengan sebaik-baiknya, maka hendaknya jangan pula dibenturkan mengenai kepentingan masing-masing. “Saran saya sambil menunggu aturan yang terbaru untuk amannya mengikuti dua akreditasi saja. *Toh*, tidak ada biaya yang harus dikeluarkan karena objek yang dinilainya sama (jurnalnya), instrumen penilaiannya juga sama, yang beda instansi yang mengeluarkan nilai. Namun, bagi pengelola jurnal yang baru mendaftarkan akreditasi sebaiknya akreditasi LIPI dulu baru Dikti, karena kami lebih merangkul pengelola jurnal baru,” tutup Furqon. (IFR)



CARA KERJA PROSES AKREDITASI LIPI DAN DIKTI

Perbedaan angka kredit antara jurnal terakreditasi LIPI dan Dikti di mata Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentu mengundang banyak tanya berbagai pihak tentang sejauh mana kualitas jurnal terakreditasi di bawah kedua lembaga besar tersebut?

S elasa pagi, dalam suasana segar Ibu Kota, *Media BPP* menjumpai Sadjuga dan Suwitno, Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual Kemenristek Dikti di Gedung BPPT (Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi) Jl. MH. Thamrin, Jakarta.

Mula-mula *Media BPP* menanyakan tentang bagaimana sistem pengajuan akreditasi jurnal ilmiah yang berada di bawah naungan Kemenristek Dikti. Dari keterangan Sadjuga dan Suwitno ternyata ada beberapa persyaratan pengajuan akreditasi yang dimiliki oleh Kemenristek Dikti yang mesti diajukan oleh pengelola jurnal jika ingin terakreditasi oleh Kemenristek Dikti. Seperti jurnal ilmiah wajib menggunakan sistem elektronik, artinya proses pengelolaan sudah tidak lagi menggunakan sistem cetak, semua transparan berdasarkan *online*. Peraturan ini memang sudah disepakati oleh Dikti maupun LIPI. Dikti mengeluarkan aturan Dirjen Dikti No 1 tahun 2014 tentang Jurnal Elektronik, sementara LIPI juga mengeluarkan Perka LIPI No 3 ta-

hun 2014 yang mengatakan mulai April 2016 jurnal sudah tersistem secara elektronik (*paper less*).

"Kami memang dari 2014 peraturan itu dikeluarkan, dan 2016 sudah tidak ada lagi yang versi cetak, sementara LIPI baru 2016 mewajibkan para pengelola jurnal di bawah naungannya untuk *online*, jadi kami sudah lebih dulu dibandingkan LIPI," kata Sadjuga.

Sementara itu, M. Nurul Furqon, Kasubid Akreditasi Pusbindiklat Peneliti LIPI mengatakan, memang LIPI dalam konteks ini lebih lambat dibandingkan Kemenristek Dikti, karena itu, salah satu persyaratan di LIPI adalah wajib memiliki ISSN (*International Standar Serial Number*) secara *online* dan cetak. ISSN didapat dengan cara mendaftarkan jurnal ke lembaga akreditasi seperti LIPI dan Dikti sebelum mengurus akreditasi jurnal ilmiah

Lalu persyaratan lainnya adalah terbit

secara berkala minimal 2 tahun, dengan minimum penerbitan dalam setahun 4 kali. Persyaratan ini diterapkan di Dikti maupun LIPI, namun, lagi-lagi Dikti membatasi diri dengan jumlah penerbitan secara *online* minimal selama 2 tahun.

Hal yang paling signifikan perbedaannya adalah terkait penilaian di administrasi dan konten jurnal itu sendiri. Administrasi biasanya menyangkut terkait pengelolaan jurnal, mulai dari penerimaan naskah, penyaringan naskah, penyuntingan oleh editor, penyuntingan mitra bestari, penyempurnaan oleh

penulis, *layout*, hingga penerbitan. Semuanya harus dipampang dalam masing-masing portal jurnal elektroniknya secara transparan. "Yang sering kali terjadi di akreditasi jurnal Dikti adalah kesalahan menyetik nama. Misal nama jurnal, periode penerbitan jurnal itu banyak yang salah. Di kami, ada 70 jurnal dari 120 jurnal seringkali salah menulis itu, karena sistem jaringan pula *lah* yang menilai, kurang titik sedikit aja bisa susah dilacak," terang Suwitno.

Sedangkan di LIPI, bukti proses tersebut bisa diunggah dalam lama <http://akreditasi.lipi.go.id> bagi yang sudah elektronik, kami juga sudah melakukan penilaian melalui sistem OJS," terang Furqon.

Sekadar informasi, jurnal terakreditasi LIPI yang sudah *online* memang baru sedikit, mengingat LIPI juga memegang ruang lingkup jurnal Litbang di Daerah. Dari jurnal di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri saja, baru 2 yang sudah elektronik yakni Jurnal Bina Praja

dan Matra Pembaruan (belum terakreditasi), sedangkan jurnal-jurnal di daerah belum ada yang elektronik bahkan masih banyak yang belum terakreditasi.

Melibatkan banyak Asesor

Lalu terkait semua konten tersebut, apakah sudah lengkap, sesuai prosedur, dan konsisten dalam setiap penerbitannya itu nantinya akan dinilai oleh tim Asesor. Asesor inilah yang juga menilai kualitas artikel dari setiap penulis di jurnal.

"Di Dikti sendiri, tadinya asesor berjumlah 2 orang, satu menilai bagaimana manajemen pengelolaan jurnal, yang satu menilai kualitas jurnal. Tapi itu dulu, sekarang bisa lebih dari 2 asesor," ungkap Sadjuga.

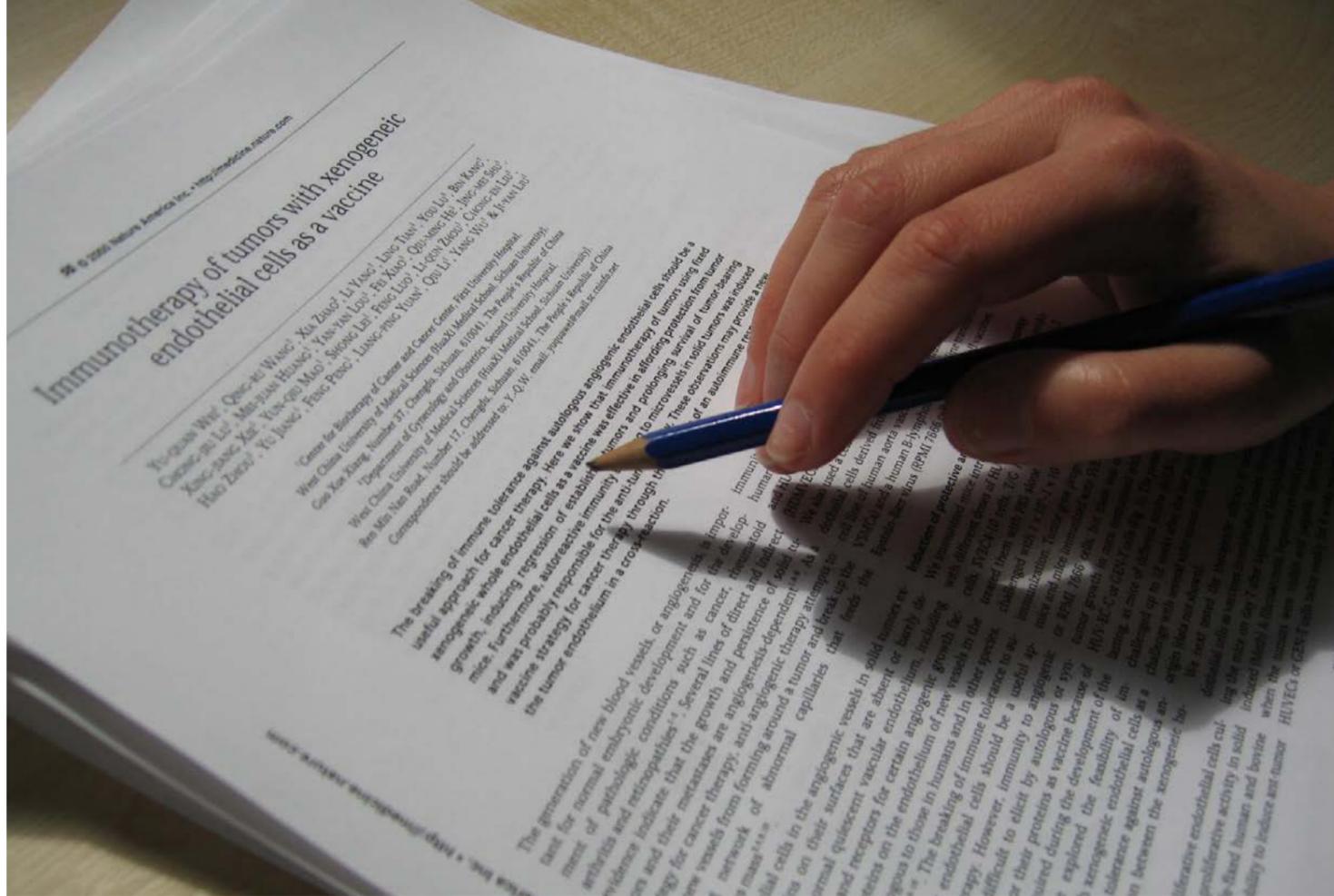
Satu asesor di Dikti bahkan bisa menilai setiap artikel tergantung bidang kepakaran yang diulas dalam artikel penelitiannya. Bahkan Suwitno dan Sadjuga mengatakan, terkadang untuk satu artikel bisa dinilai lebih dari satu asesor kare-

na cakupan penelitiannya luas. Jadi, misalnya dalam setiap penerbitan suatu jurnal menerbitkan 5 naskah, maka tim asesornya bisa kurang lebih 11 asesor, terdiri dari 1 asesor menilai manajemen, dan 10 asesor menilai 5 naskah tersebut. "Tapi itu semua tergantung fokus kajiannya, kalau jurnalnya benar-benar sudah fokus, artinya begini, misal Jurnal Bina Praja fokusnya adalah pemerintahan dalam negeri, sementara pemerintahan dalam negeri banyak sekali cangkupannya, bisa keuangan daerah, bisa pilkada serentak, bisa juga terkait Perda, maka kita butuh ahli di bidang masing-masing tersebut untuk menilai setiap fokus kajian naskah. Makanya saran saya, sebaiknya jurnal-jurnal yang cakupannya masih luas lebih dipersempit lagi fokusnya. Seperti jurnal Kementerian Kesehatan memfokuskan mengenai bakteri, maka penelitiannya seputar bakteri semua. Jadi tidak heran, Kemenkes banyak sekali jurnalnya," terang Sadjuga.

Selain itu, tim asesor dari Dikti terdiri dari beragam golongan, baik itu dari universitas, LIPI, pengamat, maupun dari Kemenristek Dikti sendiri. "Jadi memang anggaran kita banyak untuk bayar asesor tersebut," imbuhnya.

Menurut Sadjuga sebenarnya untuk pengelolaan jurnal ini, Kemenristek Dikti memunyai dua slot anggaran, yakni anggaran dari Dikti dan anggaran dari Riset. Masing-masing dari dua tupoksi itu menyediakan *space* anggaran yang cukup besar. "Karena anggaran yang besar itu, kita juga sebenarnya meminta LIPI untuk menyediakan para penulis terbaiknya untuk diadakan pelatihan penulisan jurnal supaya semakin berkualitas dan produktif," terang Sadjuga.

Berbeda halnya Dikti yang memunyai slot anggaran yang kecil untuk membayar tim asesor akreditasi, di LIPI, hanya menilai dari 2 asesor, yakni masalah pengelolaan dan juga konten. "Tapi tim asesor kami 60 persen dari peneliti," kata Furqon.



Banned bila nakal

Setelah melakukan serangkaian penilaian oleh tim Asesor, barulah diperoleh berapa nilai keseluruhan dari jurnal yang hendak diakreditasi. Masing-masing kategori penilaian mempunyai bobot penilaiannya sendiri, tapi secara menyeluruh, baik Dikti maupun LIPI sama-sama mempunyai standar penilaian yang sama, yakni minimal 72 poin untuk mendapat akreditasi keduanya.

Namun, apabila ada kesalahan di tengah jalan, artinya sudah bagus saat pendaftaran namun tidak konsisten terhadap pelaksanaan, apalagi sampai mencakup kesalahan yang fatal seperti sembarangan menerima naskah, fokus kajian berubah-ubah, jumlah terbitan tidak konsisten, maka Kemenristek Dikti bisa langsung mem-banned (menghentikan sementara akreditasinya) selama satu tahun, dan jurnal yang 'nakal' tersebut harus memulai ulang akreditasinya. "Kalau dibilang kejam sih menurut kami tidak, karena Scopus aja bisa sampai 2 tahun mem-banned, kami hanya setahun aja lho," imbuhnya.

Cara itu mereka tempuh agar jurnal ilmiah terakreditasi Dikti tidak main-main dalam menerbitkan karya ilmiah. "Kami bahkan berharap Arjuna dan Sinta ini menjadi pintu pertama para jurnal nasional untuk ke jenjang internasional. Karena banyak sekali jurnal Indonesia yang sudah di kancan internasional namun masih dipandang jelek oleh berbagai negara, makanya saringannya dari kita dulu baru ke internasional," jelasnya.

Lalu bagaimana di LIPI? LIPI masih menggunakan sistem re-akreditasi setiap 3 tahun sekali, jadi kalau misalnya ada jurnal ilmiah yang 'nakal' tidak konsisten dan sebagainya, maka pada saat akreditasi kembali akan memengaruhi nilainya.

Mimpi SINTA dan Ironinya

Dari beragam keunggulan Kemenristek Dikti yang lebih ketat dan selektif dibandingkan LIPI itu, Dikti juga menaruh harapan besar di

The screenshot shows the SINTA website interface. At the top, there's a navigation bar with 'HOME', 'ABOUT', and 'AUTH'. Below that, a large banner displays the SINTA logo and statistics: 26,004 Journal Articles, 2,108 Book Chapters, and 10 Conferences. A search bar is located below the banner. The main content area features two charts: 'Documents in Scopus' and 'Top 10 Citations by Google'. Below the charts, there's a section for the Indonesian Publication Index (IPI) with a search bar and a list of subjects for browsing publications.

sistem SINTA (Science and Technology Index). Nantinya SINTA akan menampung semua data jurnal dan penulisnya. "Jadi kalau misalnya Anda punya pacar ngaku dosen, coba cari di SINTA sudah berkarya apa saja dia, berapa tulisannya yang sudah disitasi (dijadikan referensi penelitian sejenisnya), karena SINTA ini akan mencakup semua data, baik jurnal dan penelitiannya kami menampung dari berbagai lembaga pengindeks seperti Scopus, Google Scholar, IPI dan Inasti," terang Suwitno.

Kemenristek Dikti pun katanya telah mengeluarkan 6 jenis SINTA

dalam portal yang sama, yakni SINTA 1 dan 2 untuk jurnal terakreditasi dan reputasi internasional, lalu SINTA 3-6 untuk jurnal yang belum terakreditasi. "Tapi kami memang tengah menasar jurnal yang terakreditasi lebih dulu ya, baru setelah semua sudah selesai, barulah kami menasar jurnal yang belum terakreditasi, semuanya nanti terintegrasi dengan Arjuna tapi tentu dengan penilaian yang berbeda. Misalnya, jurnal yang belum terakreditasi mendapat poin 30-40, jurnal yang sudah terakreditasi poinnya di atas 72," paparnya.

Kini sudah ada sekira 959 jurnal

yang terdaftar di SINTA. Namun, cita-cita SINTA itu ternyata masih banyak menyisakan pekerjaan rumah yang harus terus dibenahi, seperti yang diungkapkan oleh Arif Maftuhin, eksekutif editor Jurnal Al-Jamiah UIN Sunan Kalijaga. "Pada malam apresiasi Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-22 di Makassar, nilai yang dihasilkan oleh SINTA digunakan untuk memberikan penghargaan kepada 'dosen terbaik' dan 'jurnal terbaik'. Beberapa waktu kemudian juga beredar ranking universitas 'terbaik' versi SINTA. Banyak orang mengira, ranking SINTA itu sah dan keren. Bagi saya, ini ironi dan lelucon akademis yang setara dengan kasus doktor abal-abal produksi UNJ itu. Sebuah sistem yang salah digunakan sebagai referensi untuk kategori-kategori bergengsi," kata Arif.

Sistem itu menurutnya, terkait ambisi SINTA yang ingin menjadi referensi kinerja riset. Sinta tidak memiliki data. Skor yang dibuat SINTA itu 'ngutang data' ke empat database: Scopus, Google Scholar, INASTI, dan IPI. "Itu empat sistem yang kondisinya sama sekali berbeda," ungkapnya.

Scopus dikelola secara baik dan profesional. Meski ada kelemahan di sana-sini, data sitasi Scopus cukup akurat. Arif menyarankan, sebaiknya Dikti membuat ranking tersebut berdasarkan Scopus saja. Begitu pula dengan Google Scholar yang merupakan bukan sistem sitasi yang dapat dipercaya.

"Ada dua masalah dengan Google Scholar. Pertama, sistem otomatisasinya tidak sah. Saya mengalami sendiri pada akun saya. Naskah yang bukan milik saya, berkali-kali dihubungkan ke profil saya. Saya hapus, besoknya ditambahkan lagi secara otomatis. Kedua, akurat tidaknya data mengandalkan user. Nah, user nih kadang tidak paham cara membuat profil sitasi. Artikel orang lain yang "suggested" by Google,

ia klik sebagai miliknya. Contoh, profil sitasi Jurnal "Anu" yang terbit di Jakarta berisi puluhan artikel yang bukan milik jurnal itu (tentu saja sitasi jurnal itu menjadi ribuan dan ranking SINTAnya melesat tinggi)," imbuhnya.

Apalagi terkait Inasti dan IPI. Inasti itu database terkait jurnal sains dan teknologi, tentu ini tidak sesuai dengan kepakaran Arif selaku peneliti di bidang sosial, maka akan menyebabkan bias data antara pengelola jurnal sains dan sosial. "Jurnal-jurnal seperti Al-Jamiah dan Studia Islamika tidak terindeks, padahal karena masalah kepakarannya yang berbeda," katanya.

“SCOPUS DIKELOLA SECARA BAIK DAN PROFESIONAL. MESKI ADA KELEMAHAN DI SANA-SINI, DATA SITASI SCOPUS CUKUP AKURAT. SEBAIKNYA DIKTI MEMBUAT RANKING TERSEBUT BERDASARKAN SCOPUS SAJA. BEGITU PULA DENGAN GOOGLE SCHOLAR YANG MERUPAKAN BUKAN SISTEM SITASI YANG DAPAT DIPERCAYA.”

Selain itu, akreditasi dari IPI adalah database yang sudah "mati". "Saya sudah submit Jurnal Inklusi dan enam bulan ini tidak ada jawabannya. Saya kontak, email resminya bouncing, email gmail tidak dijawab," ungkap Arif

Dengan kondisi database sumber yang seperti itu, lalu datanya dikumpulkan. Dilakukan penilaian oleh SINTA. Kalau Scopus sekian nilainya, Google Scholar sekian, dst. Menurut Arif, maka SINTA seolah menutup mata terhadap data amburadul tersebut. Data diimpor tanpa verifikasi. Kalau Anda bikin profil

Google Scholar yang salah pun dia tidak peduli. Skor Anda adalah apa yang Anda buat. Skor SINTA saya lumayan tinggi karena dibantu oleh data Google yang salah," tambahnya

Dengan dua problem mendasar seperti itu, maka ranking yang dihasilkan Sinta itu menurutnya hanya sebuah 'lelucon'. "Peneliti diminta mengacu ke sistem yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, jangan ikut jadi dagelan juga dong semestinya," sarannya.

Saat diverifikasi hal tersebut ke Sadjuga dan juga Suwitno hingga saat ini mereka belum memberi keputusan.

Namun saat ditemui pada 26 September lalu, Kemenristek Dikti melalui Suwitno dan Sadjuga mengatakan, pihaknya akan terus menyempurnakan SINTA sebagai lembaga pengindeks di Indonesia yang tidak kalah dengan lembaga pengindeks luar lainnya. "Tentu kami terus menyempurnakan sistem jaringan ini, karena sebenarnya jurnal di Indonesia cukup banyak, dan sayangnya negara ini tidak punya lembaga pengindeks yang benefit, mereka kebanyakan mendaftarkan di Google Scholar dsb, dan harapan kita tentu ke depan SINTA bisa sejajar dengan lembaga pengindeks yang sudah maju," tandas Sadjuga. (IFR)





Masyarakat memegang surat suara di depan tempat pemungutan suara untuk referendum kemerdekaan Barcelona, Spanyol. REUTERS/Susana Vera

BPP Provinsi Kalimantan Barat

Mendukung Kebijakan Pembangunan Daerah

Perubahan yang sedemikian dahsyat di abad 21 ini, menuntut setiap Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) di daerah harus selalu kreatif dan inovatif. Program kegiatan harus benar-benar menyentuh persoalan kekinian sesuai dengan ciri khas dan karakteristik daerah, sehingga output yang dihasilkan berdampak besar bagi masyarakat dan tidak terkesan menghamburkan anggaran.

Sejak 2016 setelah BPP Kalbar ditetapkan menjadi sebuah Badan, agenda kelitbangan selalu diarahkan untuk mendukung kebijakan makro pemerintah Kalbar sebagaimana telah diramu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar 2013-2018, yang merupakan terjemahan dari arah kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar. Kegiatan kelitbangan pun bersifat tematik yaitu "Dukungan Penelitian untuk Mendorong Hilirisasi Industri di Provinsi Kalimantan Barat". Prioritas kegiatan yang dirumuskan juga tidak lepas dari upaya mendukung kebijakan makro pemerintah.

"Dirumuskannya tema ini merupakan upaya kami agar aksi kami yang tergambar melalui program dan kegiatan Kelitbangan dapat searah dengan tahapan-tahapan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kalbar, di mana tahapan-tahapan pembangunan itu telah diformulasi agar dijadikan pijakan dalam pelaksanaan rencana pembangunan. Norma itu berlaku pula untuk program dan kegiatan kelitbangan di tahun sebelumnya," kata Agatho Adan Kepala BPP Daerah Kalbar kepada Media BPP beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pada tahun ini aktivitas kelitbangan khususnya penelitian lebih difokuskan pada upaya mendukung kebijakan pembangunan di bidang ekonomi yang mencakup

dua urusan yaitu urusan industri dan pariwisata. Adapun perhatian penuh dari kedua urusan tersebut diarahkan pada pengembangan sub-sistem industri hilir yang terintegrasi dengan industri pengolahan hasil perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan, penumbuhkembangan industri kecil dan menengah unggulan provinsi, yang berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan *one village one product* (OVOP), serta meningkatkan industri berbasis kreativitas yang memunyai keunggulan komparatif dan kompetitif.

Atas dasar itu, dirumuskan beberapa penelitian besar yang diagenda pada 2017 seperti pengembangan bahan baku pupuk mendukung ketahanan pangan daerah, model dan strategi peningkatan produksi komoditas pangan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan daerah, dan pengelolaan potensi seni dan warisan budaya dalam pengembangan industri kreatif. "Untuk pelaksanaannya akan dimulai pada April 2017 dan diharapkan selesai November 2017. Output dari penelitian tersebut nantinya sebagai rekomendasi yang diharapkan dapat mendukung kebijakan pembangunan pemerintah Kalbar khususnya di bidang ekonomi," ucap Agatho.

Agatho menuturkan, jauh sebelum menjadi badan atau ketika masih menjadi Kantor Litbang dan Diklat, BPP Kalbar selalu membuat terobosan program yang tidak berhenti

pada dokumen dan sekadar menghabiskan anggaran. Beberapa program yang digagas memiliki pengaruh terhadap peningkatan pembangunan Kalbar. Hal itu tidak lain karena program penelitian yang digagas dituntut berkualitas serta dapat mendorong dan mendukung sistem inovasi daerah dan daya saing daerah. Program penelitian juga didorong untuk menghasilkan model kerja sama antara lembaga kelitbangan, plaku usaha, dan masyarakat.

Seperti contoh pada 2016, BPP Kalbar membuat 13 program un-

gulan untuk mendorong sistem inovasi dan daya saing daerah. Program tersebut merupakan model kerja sama antar-aktor. Ketiga belas program tersebut seperti kajian strategi pengembangan kawasan dalam rangka mendukung ketahanan pangan daerah, kajian model pengelolaan sumber daya perikanan melalui pemberdayaan kearifan lokal, kajian model dan strategi pengembangan produk ternak dalam rangka mendukung program swasembada produk ternak, pengembangan pestisida hayati, pengembangan teknologi budidaya berbagai varietas kedelai pada berbagai jenis tanah, lomba karya ilmiah, lomba karya perkerjasama, penyusunan *Idea Concept Paper* (ICP), seminar riset, forum forum diskusi, riset peningkatan kapasitas peneliti / perkerjasama, pengelolaan jurnal ilmiah, serta perhelatan rapat koordinasi kelitbangan.

Program tahun lalu

Dalam rangka mendukung ketahanan daerah, salah satu program yang digagas tahun lalu, misalnya, BPP Kalbar membuat sebuah kajian strategi pengembangan kawasan pangan yang dilaksanakan di Desa Bilayuk, Kecamatan Mempawah Hulu, dan Kabupaten Landak. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi geografis, kondisi ketahanan pangan,

mengidentifikasi program-program terkait ketahanan pangan dan mengidentifikasi jenis/program pemberdayaan yang telah dilakukan di lokasi penelitian, serta menganalisis peranan modal sosial.

"Penelitian juga untuk melihat sejauh mana peran modal sosial horizontal yang telah menjadi bagian dari pengetahuan dan kearifan lokal tersebut berperan dalam mendukung sistem ketahanan pangan rumah tangga. Sehingga pada akhirnya bisa memberikan *output* penelitian yang lebih signifikan dan bisa digeneralisasikan serta menjadi masukan untuk sebuah kebijakan di tingkat pengambil keputusan," terang Agatho.

Selain mendukung ketahanan pangan, BPP Kalbar juga membuat program pemberdayaan kearifan lokal melalui pengelolaan sumberdaya perikanan. Kabupaten Sambas dipilih menjadi objek penelitian, pasalnya produksi ikan dan pertumbuhan jumlah nelayan di kabupaten tersebut terus meningkat sejak dua tahun terakhir. Nelayan di Kabupaten Sambas juga telah memiliki pengetahuan menjaga kelestarian lingkungan dan biota laut. Namun dalam pengelolaan sumber daya laut itu, menurut Agatho perlu sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat. Selain itu, dibutuhkan koordinasi antar-nelayan yang harus diprakarsai oleh instansi terkait. Dengan begitu akan memudahkan pemberdayaan serta diharapkan di waktu yang akan datang bisa meningkatkan pemanfaatan sumber daya perikanan.

"Hal itu jika dilakukan juga akan mendorong pembentukan lembaga yang diberi mandat untuk melestarikan kearifan lokal yang dimotori oleh penyuluh, peningkatan pengawasan di laut bekerja sama dengan kelompok-kelompok nelayan, penegakan hukum, pemberdayaan SDM di bidang perikanan melalui sosialisasi (desiminasi) kerarifan lokal, seperti contoh penanggulangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan," kata Agatho.

Peran peneliti

Peneliti memegang peran penting di setiap program penelitian yang dijalankan, meski dari segi kuantitas sangat minim. Menurut salah seorang

peneliti Edi... sejauh ini para peneliti telah mampu memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatannya. Hal itu menurut Edi menjadi penting, pasalnya sangat berimplikasi pada karier atau kenaikan pangkat serta jenjang jabatan peneliti. Keahlian peneliti dan perkerjasama meskipun masih bersifat personal juga sangat diperhitungkan, beberapa lembaga swasta dan pemerintah kabupaten kerap memanfaatkan tenaga mereka. "Beberapa kegiatan perusahaan yang melibatkan tenaga fungsional, seperti, *Land Application* Limbah Kepala Sawit dan di pemerintah daerah seperti penelitian peningkatan produksi pangan beberapa waktu lalu," terang Edi.

Saat ini, terdapat empat orang tenaga jabatan fungsional peneliti dan perkerjasama. Yaitu satu orang peneliti madya, satu peneliti pertama, dan dua perkerjasama madya. Oleh sebab itu, BPP Kalbar tengah mengupayakan penambahan tiga orang peneliti. Terakhir Kepala BPP Kalbar berharap ada mekanisme yang dapat mempercepat penambahan personel peneliti dan perkerjasama BPP Kalbar melalui jalur penyesuaian.

"Saya mendapat informasi, perturan mengenai *inpassing* itu sudah ada yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, tetapi petunjuk teknisnya belum ada. Oleh karena itu, kita berharap dan mendorong lembaga terkait seperti LIPI dan BPPT untuk mempercepat pembuatan Juknis yang substansinya mengatur *inpassing* atau alih jabatan dari fungsional umum atau struktural ke fungsional peneliti atau perkerjasama atau analis kebijakan," tutup Agatho. (MSR)



BPP Provinsi Jawa Timur

Anggarkan Penelitian Garam Tradisional

Selain memiliki 5 bidang garapan yang dilaksanakan pada tahun ini, BPP Jawa Timur juga tengah fokus pada kesejahteraan petani garam. Sesuai rencana, BPP Jawa Timur akan melaksanakan penelitian terkait pengelolaan garam yang berasal dari para petani tradisional. Penelitian diharapkan bisa menemukan solusi untuk meningkatkan taraf hidup para petani garam. Rencananya, garam tradisional akan dikelola seperti halnya garam industri, sehingga dengan kualitas baik, garam bisa memiliki nilai jual tinggi.

Indonesia beberapa waktu lalu sempat mengalami paceklik garam. Per tahun, Indonesia membutuhkan garam sebanyak 4,3 juta ton sementara produksi garam nasional hanya 30.600 ton. Hal tersebut juga tentu tak sebanding dengan produksi garam tahunan rata-rata 1,2 juta ton. Meski harga garam masih dinilai tinggi, namun saat ini pasokan garam sudah

stabil seiring dengan impor garam sebanyak 226 ribu ton yang dilakukan pemerintah.

Di sisi lain, paceklik garam membuat harga garam kian melambung di pasaran. Tingginya harga garam rupanya tidak berbanding lurus dengan keberadaan para petani garam di Madura, Jawa Timur. Padahal, Madura merupakan daerah penghasil garam tertinggi di Indonesia. Madura masih menempati daerah dengan tingkat

kemiskinan tertinggi di Indonesia. Kehidupan para petani garam juga tidak menunjukkan adanya tanda-tanda peningkatan ekonomi dari tahun ke tahun, harga garam tinggi tidak membuat petani kebanjiran uang, tetapi malah sebaliknya, sebagian dari mereka harus rela gulung tikar bahkan menganggur. Anomali cuaca setahun terakhir dianggap tidak bersahabat dengan para petani garam, sehingga menyebabkan produksi garam tahun

ini jauh dari target yang ditetapkan pemerintah.

Sebagai komoditas utama Jawa Timur, garam menjadi program yang akan dicanangkan pemerintah Provinsi Jawa Timur di tahun mendatang. Tidak hanya soal produksi, namun juga masalah kesejahteraan petani. Menurut Ardo Sahak Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Jawa Timur, pemerintah Jawa Timur saat ini tengah mendorong garam

sebagai industri primer provinsi. "Madura memiliki potensi garam melimpah. Pada cuaca normal, produksi kristal putih itu kurang dari 36 ribu ton. Potensi tersebut mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur," ucap Ardo ketika ditemui di Badan Penelitian dan Pengembangan Jawa Timur.

Pengelolaan industri garam di Jawa Timur khususnya yang berasal dari para petani tradisional, menurut Ardo

perlu sentuhan inovasi. Hal itu sejalan dengan tupoksi BPP sebagai lembaga yang melaksanakan penyusunan dan koordinator Sistem Inovasi Daerah (SIDa). BPP juga ditunjuk langsung oleh Gubernur Jawa Timur terkait pengelolaan garam pada tahun mendatang. Pemilihan garam juga menjadi alasan penting bukan hanya sekadar komoditas yang melimpah, melainkan dengan inovasi diharapkan garam bisa bernilai sejak dari petani.

Ardo menambahkan, jika dikelola lebih baik, garam akan menjadi industri andalan yang bisa menyejahterakan. Garam selayaknya dikelola seperti komoditas pertanian lain seperti pisang yang diolah menjadi berbagai jenis makanan dan memiliki nilai jual. Momen tersebut sangat tepat, pasalnya pemerintah Jawa Timur saat ini tengah gencar mengangkat produk-produk lokal agar bisa diproduksi secara massal.

"Pak Gubernur itu ingin mengangkat produk-produk Jatim. Di semua sektor termasuk pertanian, perikanan, kelautan, pokoknya semua sektor, termasuk garam. Sederhananya begini, misal kita menanam pisang, kalau pisangnya saja dijual satu tandur paling harganya Rp 200 ribu, tapi kalau pisangnya tadi dikelola menjadi keripik pisang *kan* beda, ada peningkatan kualitas di situ dan ada peningkatan nilai. Kalau sudah diolah menjadi keripik pisang, itu bisa sampai 30-50 pcs, dengan kemasan rapi. Harga satuannya bisa mencapai Rp 10 - Rp 15 ribu. Itu konsep teorinya. Begitu juga dengan garam, jika harga garam dari petani tradisional saat ini hanya Rp 7 ribu per kilogram, dengan sentuhan inovasi bahkan dengan beberapa pelatihan terhadap para petani garam oleh pemerintah Jawa Timur selama ini, diharapkan garam lokal bisa bersaing di pasaran, lebih jauh lagi garam kualitas bagus yang selama ini dikonsumsi masyarakat tidak lagi diimpor dari Australia," tuturnya.

Untuk itu penelitian tentang garam akan menjadi prioritas BPP Jawa Timur 2018. BPP Jatim tahun ini pun tengah membuat kesepakatan dengan berbagai pihak. Gayung bersambut, terkait penelitian garam, BPP Jatim pun mendapat *support* dan penelitian ini menjadi salah satu rekomen-

si Bappeda. BPP mewacanakan bisa menjadikan garam tradisional menjadi garam berkualitas atau sekelas garam industri. BPP Jatim berencana menggandeng perguruan tinggi dalam proses penelitiannya nanti. Ardo berharap harga garam tradisional akan memiliki harga jual tinggi yaitu Rp 700 ribu perkilogram. BPP Jatim juga tengah bergerilya dan kerja sama dengan beberapa lembaga seperti Dinas Perikanan dan Kelautan terkait garam tersebut. Diharapkan pula BPP Jatim dapat menghasilkan penelitian kualitas dan mutu garam, khususnya garam Madura.

Dipilihnya garam sebagai industri utama Jawa Timur bukanlah tanpa sebab, Jagung sebetulnya menjadi komoditas utama di Madura selama ini. Namun pengembangan jagung membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Awalnya pemerintah Jawa Timur mewacanakan pengembangan jagung dengan rencana awal penanaman 10 ribu hektare jagung berkualitas bagus. Setelah dilakukan komunikasi lebih lanjut, kemudian wacana tersebut dibatalkan.

Alasannya jagung tidak hanya akan memakan waktu yang lama hingga panen, namun juga akan menambah beban biaya. Cuaca panas Madura akan membuat pemerintah mengeluarkan biaya lebih karena jagung lebih cocok di lahan dengan kontur tanah yang relatif basah. Jika itu terjadi, Dinas Pekerjaan Umum harus bekerja ekstra untuk mensupport air PAM setiap saat, hal itu tidak akan cukup sekali saja jika penanaman dilakukan pada musim kemarau. Hal itu tentu berbeda dengan garam, apalagi jika sudah dikelola, ketika cuaca tidak berpihak kepada para petani, maka harga menjadi solusi sebagai penutup kekuarangan produksi.

"Artinya setiap program itu kita sudah memikirkan nanti seperti apa dampaknya, kemudian kendalanya, apa sudah diteliti, nah kemarin tanpa diteliti sudah jelas kalau menanam jagung pasti butuh air kalau musim kemarau bagini bagaimana, apakah bisa hidup kalau 1 hektare," tambah Ardo.

5 agenda penelitian

Tidak hanya berfokus pada garam yang menjadi garapan BPP Jatim tahun depan, tahun ini penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, koperasi dan UMKM, investasi industri perdagangan dan lingkungan hidup, serta kebencanaan menjadi agenda



besar penelitian yang akan dilakukan BPP Jatim.

Penanganan kemiskinan seperti tak pernah selesai mendera bangsa. Kemiskinan *bak* permasalahan akut yang menjadi prioritas penyelesaian pemerintah baik pusat maupun daerah. Tidak terkecuali BPP Jawa Timur yang terus berusaha memberikan solusi dan masukan terkait penanganan kemiskinan. Kemiskinan di Jawa Timur juga ditangani oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) dan Dinas Sosial. Terkat hal itu, BPP selalu berkoordinasi dengan kedua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut.

Penanganan kemiskinan dilakukan dengan mengembangkan riset IP-TEK untuk mendukung percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan, riset itu diharapkan dapat menurunkan jumlah penduduk mi-

skin, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan terpenuhinya hak dasar masyarakat miskin. BPP Jawa Timur juga menetapkan tema riset dengan isu strategis penanggulangan kemiskinan yaitu penanggulangan feminisasi kemiskinan, kerentanan kemiskinan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan bagi warga miskin serta peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga miskin.

Kemiskinan selalu berkaitan dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan menjadi urusan wajib pemerintah di daerah. Untuk itu, BPP Jawa Timur juga menetapkan agenda penelitian ketahanan pangan dalam program kerjanya. Riset dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan ketersediaan pangan masyarakat (*food availability*), penyerapan pangan (*food utilization*), akses pangan

(*food access*) dan revitalisasi pertanian. "Untuk riset ini kita menetapkan tema riset dari isu strategis pertanian dan ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan dan pemanfaatan pangan, termasuk di dalamnya infrastruktur pertanian," terang Ardo.

Riset pangan jadi prioritas

Ardo juga menambahkan ketahanan pangan memang harus menjadi prioritas utama, menurutnya pendidikan dasar dan kesehatanlah yang semestinya berada di nomor dua. "Kesehatan *tuh* nomor dua. Makan dulu baru kesehatannya seperti apa, pendidikannya seperti apa, papan rumahnya seperti apa. Di sektor pangan ini kita ada Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan, dan Dinas Perkebunan. Nah itu adalah sektor-sektor untuk ketahanan pangan. Misalkan pertanian bagaimana untuk swasembada beras, bagaimana untuk swasembada jagung, dan kedelai. Kemudian hortikulturanya bagaimana, buah-buahnya seperti apa, itu *kan* untuk penggunaan gizi semua. Kemudian ada Dinas Kelautan dan Perikanan bagaimana untuk nutrisi gizi terkait dengan hasil laut, ada lagi Dinas Peternakan, ada susu, ada daging. Kemudian perkebunan ini lebih ke hasil mereka, ada kakao, ada kopi dan sebagainya, BPP Jatim harus selalu berkoordinasi dengan mereka," tambahnya.

Agenda penelitian selanjutnya di bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Riset ini dilakukan guna mendukung posisi tawar dan efisien-

si serta penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan volume usaha dan kualitas koperasi dan UMKM, meningkatnya jumlah wirausaha baru, dan meningkatnya kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan pelayanan terkait dengan kegiatan ekonomi kerakyatan.

Salah satu cara memberdayakan masyarakat oleh pemerintah Jawa Timur adalah melalui koperasi dan UMKM. Koperasi dan UMKM menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat di tingkat bawah. Jawa Timur saat ini telah memiliki lebih

“PENELITIAN INI DIHARAPKAN DAPAT MENINGKATKAN VOLUME USAHA DAN KUALITAS KOPERASI DAN UMKM, MENINGKATNYA JUMLAH WIRAUSAHA BARU, DAN MENINGKATNYA KONTRIBUSI UMKM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI.

dari 8000 koperasi wanita. Koperasi tersebut sekaligus juga menjadi sarana pemberdayaan perempuan di Jawa Timur.

Dibanding daerah lain di Indonesia, Jawa Timur tergolong derah ramah investasi, kepada Media BPP Ardo

mengatakan, Jawa timur memiliki banyak investor dari berbagai negara baik Asia, Amerika, maupun Eropa, namun Investor Eropa masih terbilang kecil. Penelitian di bidang ini dirasa cukup penting, untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif, serta mencari solusi agar izin prinsip dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) serta Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan investasi daerah meningkat. Dengan begitu dapat meningkatkan kontribusi di sektor industri, kunjungan wisata, kualitas seni budaya lokal, serta volume ekspor dalam dan luar negeri.

"Agenda penelitian terakhir adalah lingkungan hidup. Penelitian ini untuk mendukung perbaikan sistem pengelolaan, pendayagunaan, konservasi dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup, sumber daya air, daerah aliran sungai, pertanian dan hutan, wilayah pesisir dan laut dan sumber daya alam lainnya. Contohnya yang lalu ada longsor di Ponorogo, Nganjuk, atau bencana lain seperti banjir yang selalu rutin di Jawa Timur, kemudian banjir di Bojonegoro, Lamongan, Gresik, dan Sampang. Setelah dilakukan penelitian ternyata permasalahannya selalu sama yaitu jalannya air yang sering tersendat dikarenakan sungai yang sempit, sehingga menyebabkan air sungai meluap," jelas Ardo.

Output lima fokus garapan BPP Jawa Timur diharapkan bisa tercapai pada tahun ini. Karena hal itulah yang menjadi ukuran keberhasilan setiap program yang dijalankan. (MSR)



SEMARANG, TIDAK MELULU HARUS LAWANG SEWU

Lawang Sewu atau Klen-teng Sam Po Kong menjadi destinasi favorit para pelancong ketika ke Semarang Jawa Tengah. Selain tempatnya yang berada di tengah kota, kedua tempat tersebut menyajikan wisata sejarah penting Indonesia, khususnya kota Semarang. Saat ini, tidak hanya di Semarang, untuk menarik banyak wisatawan, di berbagai daerah kemudian diciptakan tempat-tempat wisata baru karena potensi keindahannya, seiring dengan pengembangan tempat wisata yang sudah ada agar pengelolaannya lebih baik dan profesional. Beberapa tempat wisata diharapkan dapat mengangkat potesi daerah serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar.

Semarang ternyata tidak melulu Lawang Sewu, banyak tempat wisata menarik yang tidak boleh dilewatkan oleh para pelancong. Awal Agustus lalu, Tim Media BPP berkesempatan mengunjungi tempat-tempat wisata menarik di Semarang dan sekitarnya, seperti Umbul Sidomukti, Candi Gedong Songo, Lereng Kelir, Brown Canyon, Pagoda Avalokitesvara, dan Candi Tugu.

Umbul Sidomukti dan Candi Gedong Songo

Perjalanan ke Umbul Sidomukti bisa ditempuh selama 30 menit dari Ungaran, Kabupaten Semarang. Untuk ke sana pengunjung harus melewati perkampungan dengan jalanan yang menantang, ketika memasuki Desa Sidomukti khususnya.

Sepuluh menit sebelum tiba di pusat wisata, kendaraan harus melewati jalanan dengan tanjakan yang curam. Pengemudi harus selalu fokus, tangan kiri harus selalu siap dengan rem tangan, sementara kaki kanan harus selalu siap dengan rem dan gas. Tidak hanya itu, minimnya penunjuk jalan menuju tempat wisata membuat pengemudi harus berhenti di tanjakan dan bertanya arah kepada penduduk setempat. Beberapa kendaraan bermotor yang berpapasan dengan kendaraan yang kami tumpangi terpaksa harus menepi, karena kondisi jalan yang sangat kecil. Meski begitu, perjalanan ke Umbul Sidomukti masih sangat alami. Perkebunan dan rumput liar memenuhi persawahan, beberapa penduduk terlihat membawa rumput untuk binatang ternak. Dari jenis rumput yang dibawa petani bisa dipastikan, Sapi, menjadi binatang ternak paling banyak dimiliki penduduk setempat. Dan benar saja. “Untuk Sapi pak,” ucap seorang petani ketika kami bertanya untuk binatang ternak apa rumput-rumput yang dibawanya.

Umbul Sidomukti berada di Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Tempat ini berada tepat di bawah lereng Gunung Ungaran, sehingga tidak aneh jika udara masih terasa sejuk. Berada di ketinggian 1200 mdpl, tempat ini menawarkan berbagai wahana, namun yang utama adalah empat buah kolam bertingkat dengan air yang dingin, jernih dan tentu saja menyegarkan. Sebenarnya tidak lengkap jika ke Umbul Sidomukti tidak menyempatkan diri masuk ke dalam kolam terse-



but. Namun, karena Tim Media BPP harus mengejar waktu untuk ke tempat berikutnya, kami hanya menikmati keindahannya saja.

Berada di ketinggian, Umbul Sidomukti juga menawarkan keindahan alam yang menyegarkan mata, berlatar bukit, pegunungan, serta Kabupaten Semarang sejauh mata memandang. Semakin lengkap dengan balkon yang disediakan untuk para pengunjung mengambil gambar. Setahun setelah dikelola secara profesional, Umbul Sidomukti didukung dengan fasilitas lainnya seperti *outbond training*, *adrenalin games*, *camping ground*, hingga fasilitas *meeting room*. Tiket masuk para pengunjung juga sudah dilengkapi asuransi. Pengunjung cukup membayar seharga Rp 10 ribu di hari biasa dan Rp 13 ribu di hari libur tidak termasuk wahana *adrenalin games* seperti *flying fox* dan *rapeling*. Menurut salah seorang penjaga tiket, harga tersebut naik dari tahun lalu seharga Rp 5 ribu untuk hari biasa dan Rp 10 ribu untuk hari libur. “Mulai tahun ini naik, karena pengelolaan kita sudah le-

bih baik,” ujarnya.

Harga tiket memang terjangkau, dibanding dengan fasilitas dan pesona yang ditawarkan. Sayangnya infrastruktur belum maksimal. Jalan yang layak dan besar menuju ke Umbul Sidomukti menjadi pekerjaan rumah pengelola dan pemerintah selanjutnya, agar wisatawan kembali datang ke sana, serta tidak merasa sungkan karena kondisi jalannya.

Setelah dari Umbul Sidomukti Media BPP bergerak menuju Candi Gedong Songo. Tidak jauh dari Umbul Sidomukti, Candi Gedong Songo bisa ditempuh dalam waktu 20-30 menit. Candi Gedong Songo merupakan kompleks bangunan candi peninggalan budaya Hindu yang terletak di desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Tepatnya di lereng Gunung Ungaran. Di kompleks candi ini terdapat sembilan buah candi.

Dari informasi yang didapatkan Candi ini ditemukan oleh Raffles pada 1804 dan merupakan peninggalan budaya Hindu dari zaman Wangsa Syailendra abad ke-9 (927 masehi). Gedong Songo berasal dari bahasa

Jawa, gedong (rumah/bangunan) dan songo (sembilan) yang berarti sembilan (kelompok) bangunan.

Komplek candi dibuat berderet dari bawah ke atas perbukitan mengitari kawah sumber air panas. Dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk bisa mengitari sembilan candi dari mulai gapura pintu masuk hingga kembali ke candi pertama. Kami awalnya berencana mengunjungi sembilan candi dengan berjalan kaki, namun hanya mampu sampai candi ketiga. Setiap candi dibuat berjauhan dengan trek seperti mendaki gunung, namun dengan jalan setapak yang dibuat rapi seperti gang.

Untuk mengunjungi kesembilan candi, pengelola juga menyediakan kuda dengan tarif berbeda dari pejalan kaki. Pengunjung cukup merogoh kocek Rp 100 ribu, sang pemandu dengan senang hati akan mengantarkan lengkap dengan sejarah candi. Menurut salah seorang pemandu, butuh waktu satu jam mengelilingi sembilan candi dengan berkuda dan dua jam dengan berjalan kaki. Ternyata benar, kami memerlukan waktu satu jam untuk sampai di candi ketiga hingga kembali lagi ke candi pertama.

Selain wisata peninggalan sejarah, kompleks Candi Gedong Songo juga menawarkan pemandangan yang indah karena berada di ketinggian 1200 mdpl. Kompleks candi yang bersih dengan beberapa taman yang mengitarinya menunjukkan candi tersebut dikelola dengan baik.

Pesona Lereng Kelir

Satu tahun terakhir nama Lereng Kelir kian santer sebagai tempat wisata di atas bukit yang keindahannya tiada dua. Menurut warga setempat lereng kelir sendiri baru diresmikan akhir 2016 ketika para mahasiswa Pascasarjana UGM menemukan potensi wisata yang ada di bukit kelir. Masyarakat dan karang taruna setempat kemudian berinisiatif membuka jalur hingga ke puncak Kelir. “Lama-lama Lereng Kelir jadi dikenal orang, kadang kalo hari libur banyak pengunjung, pernah waktu itu hingga 3000 pengunjung sehari, pas hari Natal,” kata penduduk setempat.

Spot bernuansa alam dengan udara se-

juk dan segar selalu menjadi destinasi favorit wisatawan yang sering diburu. Dan gardu pandang di atas ketinggian 715 mdpl adalah tujuan utama orang mengunjungi lereng kelir. Gardu Pandang Lereng Kelir terletak di kawasan Gunung Kelir, tepatnya di Dusun Brongkol, Desa Gertas, Kecamatan Jambu, Kota Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Lokasinya yang berada di ketinggian, membuat pengunjung harus benar-benar mempersiapkan fisik dan mental, karena jalanan bukan cuma menanjak tetapi juga berkelok.

Untuk sampai ke puncak, pengunjung harus ekstra sabar, butuh waktu dua jam dari tempat parkir hingga tiba di Gardu Pandang, itu bagi orang yang pertama kali mendaki. Penduduk setempat bisa kurang dari itu, karena mereka sudah terbiasa, bahkan salah seorang petani mengatakan, mereka hanya butuh waktu dua jam untuk berangkat hingga tiba kembali di rumah dan sudah membawa sekarung rumput dan kopi. "Saya biasanya dua jam sudah balik lagi, itu sudah selesai *ngambil* rumput, dan panen kopi," ucapnya.

Perjalanan menuju Gardu Pandang, meski curam dan terjal, rasa lelah tidak akan terasa karena di kanan kiri jalan, pengunjung dimanjakan dengan pemandangan yang jarang ditemukan di perkotaan. Bulir hijau dan aroma daun kopi menemani sepanjang perjalanan, pemandangan khas pegunungan dengan hamparan hutan hijau begitu menyenangkan.

Waktu yang tepat, kami tiba di Gardu Pandang pukul 17.30 ketika matahari akan tenggelam, ketika langit menunjukkan kuning keemasan. Di gardu Pandang kami bisa menyaksikan epiknya harmonisasi alam antara langit, pepohonan, gunung-gunung dan *landscape* Kota Semarang.

Sebagai tempat wisata yang sedang naik daun di Semarang, Lereng Kelir perlu pembenahan. Selain infrastruktur, kelengkapan fasilitas seperti toilet, tempat parkir, dan akses jalan harus menjadi perhatian. Minimnya tempat

sampah membuat para pengunjung bebas membuang sampah di antara pepohonan dan semak belukar, hal itu cukup mengganggu pemandangan, keberadaan warung di kanan kiri jalan sebaiknya ikut berperan dalam pengelolaan lingkungan Lereng Kelir. Selain sampah, masalah lain adalah tempat parkir yang sempit serta tidak adanya akses jalan berbeda antara kedatangan dan pulang, jalan yang tersedia saat ini sangat kecil dengan kondisi curam. Bisa dibayangkan ketika berpapasan dengan kendaraan yang datang atau turun, misalnya, bagi orang awam hal itu tentu sangat menyulitkan.

Menanti manfaat Brown Canyon dan Candi Tugu

Bergeser ke arah Kota Semarang, Tim Media BPP bergerak menuju Brown Canyon yang terletak di daerah Rowosari Meteseh, Tembalang. Beberapa meter sebelum tiba di lokasi, debu-debu beterbangan, perkampungan layaknya kota mati, debu-debu menempel di teras, halaman, dan kaca rumah, perkampungan pun terasa gersang. Debu tersebut rupanya dibawa oleh truk-truk besar pembawa pasir dari

lokasi Brown Canyon. Jalanan ke sana juga sangat hancur, dan sepertinya sengaja tidak diperbaiki, karena percuma, truk besar pembawa material akan meluluhlantakkan kembali jalan yang sudah diperbaiki.

Brown Canyon adalah istilah keren yang diberikan oleh anak-anak muda untuk menyebut batuan-batuan yang menjulang tinggi seperti halnya Grand Canyon yang terletak di Taman Nasional di utara Arizona, Amerika Serikat. Brown Canyon sendiri merupakan tempat proyek galian yang sudah berumur 10 tahun lebih. Di sini pula masyarakat mengais rezeki, karena materi yang dihasilkan tidak hanya pasir, tetapi juga tanah urug dan batu padas.

Keindahan panorama alam yang eksotik membuat Brown Canyon disebut-sebut sebagai salah satu obyek wisata dan tempat terbaik para pecinta fotografi. Tebing-tebing yang menjulang tinggi dipadu dengan pohon-pohon di puncaknya membuat tempat ini semakin lengkap.

Keindahan Brown Canyon rupanya ti-

dak indah kehidupan masyarakat di sekitarnya. Brown Canyon hanya sebagian kecil dari salah satu blok galian dari banyaknya galian pasir di Tembalang. Sebagai tempat galian yang sudah lebih dari 10 tahun, Brown Canyon ternyata tidak membuat sejahtera masyarakat sekitar, ukurannya adalah rumah-rumah warga yang masih terlihat kumuh dengan kondisi cukup memprihatinkan. Kerusakan alam yang ditimbulkan ternyata tidak sebanding dengan kesejahteraan yang didapatkan warga.

Kini Brown Canyon menjadi objek wisata resmi. Namun tidak tampak sama sekali. Pengunjung bebas masuk tanpa tiket, tidak ada petunjuk resmi, bahkan warga setempat tidak tahu di mana Brown Canyon tersebut. Ketika kami bertanya lokasi Brown Canyon, si pengangkut pasir *kikuk* kebingungan, dan bertanya kepada temannya, dan temannya pun sama tidak tahunya, yang mereka tahu hanyalah galian pasir saja. Kami harus menjelaskan dua kali jika tempat yang dimaksud adalah tempat galian pasir. "Di mana

itu mas, *oh*, kalo galian pasir di situ mas," terangnya sambil menunjuk arah.

Meski sudah jadi tempat wisata, tidak ada tanda-tanda proyek galian pasir dihentikan. Malah truk-truk besar dan alat berat semakin banyak kedatangan ketika kami menyempatkan turun dari kendaraan. Tidak ada pembangunan fasilitas tempat wisata dan infrastruktur penunjang lainnya. Padahal jika dikelola secara resmi serta melibatkan warga sekitar, kerusakan alam bisa berbalik menjadi solusi yang menyejahterakan.

Selain Brown Canyon, ada juga situs budaya yang dilupakan. Padahal situs tersebut masuk dalam daftar tempat wisata yang wajib dikunjungi ketika ke Semarang. Adalah Candi Tugurejo yang belum terlalu dikenal masyarakat luas. Candi Tugurejo konon adalah candi perbatasan antara Kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Lama tak terurus, pada era Hindia Belanda 1938 sejarawan J Knebel memerintahkan dilakukan pemugaran dan diletakan sebuah prasasti. Pada 1980an Pemkot Semarang kembali merenovasi dan dijadikan sebagai tempat wisata budaya.

Ironis memang, saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Tidak terawat, rerumputan setinggi orang dewasa memenuhi kompleks candi, begitu juga dengan sampah yang mulai menyesaki pelatarannya. Undakan gapura dan tangga masuk terpotong dengan galian, tanah di sekelilingnya kerap dimanfaatkan warga untuk mengurug lahan. Selain itu juga di bawahnya tengah menjadi tempat transit limbah aspal bekas jalanan. Salah seorang warga Rukianto mengatakan, selama bertahun-tahun tempat tersebut dibiarkan. Khususnya setelah adanya pabrik pembuatan batu seplit yang tidak jauh dari sana. "Sudah lama begini, warga juga bebas *ngambil* tanahnya ke sini, untuk urugan bikin rumah," ujarnya.

Kompleks candi yang tidak begitu besar juga semakin memprihatinkan ketika sampah memenuhi setiap sudut utama bahkan di ruang utama candi. Dari mulai sampah plastik hingga kasur lipat meleng-

kapi keterbengkalaiian candi tersebut. Papan penanda cagar budaya dibiarkan tergeletak, di antara semak dan rerumputan. Kompleks candi pun kerap dimanfaatkan anak-anak sekolah *nongkrong* pada jam pelajaran. Seperti yang ditemui Tim ketika berkunjung pada pagi menjelang siang hari. Puluhan anak berseragam sekolah yang terdiri dari pria dan wanita tampak di sana. Bukan berdiskusi namun mempertontonkan hal yang tidak terpuji seperti merokok dan saling berpelukan. Ketika kami datangi puluhan anak tersebut kalang kabut, ada yang bersembunyi dan juga ada yang santai saja. Seorang anak lelaki bertubuh kecil berkulit sawo matang menghampiri, ia meminjam korek api. Bukan untuk membakar sampah dan rerumputan namun untuk rokok yang ia beli. "Ini sudah lama *gak* diurus, sekarang *ya* jadi tempat *nongkrong* kita-kita, *kan* udaranya adem enak mas," celotehnya.

Lagi-lagi pemerintah seperti abai terhadap situs yang memiliki nilai historis, diperparah dengan paradigma masyarakat yang tidak menghargai sejarah budaya, menjadikan situs tersebut kian tak terawat. Jika pemerintah setempat dan masyarakat menghargai kebesaran sejarah Nusantara, maka pembiaran terhadap situs tersebut tidak akan terjadi. Di tengah gempuran paham baru yang masuk ke Nusantara, tidak seharusnya kearifan lokal menjadi terbengkalai. terlepas dari nilai budaya yang ada, situs yang dipugar dengan anggaran negara tersebut seharusnya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dengan kesadaran pribadi, masyarakat sebaiknya mengelola secara mandiri dan menjadikannya sebagai tempat wisata sejarah dan budaya secara komersil, atau bisa juga dijadikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) bernilai budaya, misalnya. Lembaga pendidikan disekitar situs tersebut juga rupanya tidak peduli, padahal kompleks tersebut bisa dimanfaatkan menjadi taman diskusi dan kuliah lapangan siswa-siswi, dari pada menjadi tongkrongan tidak bermanfaat sebagian siswa-siswinya. (MSR)



DIREKTUR EKSEKUTIF LOKATARU, HARIS AZHAR

PENELITI HARUS BERANI

Nama Haris Azhar mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namanya besar sebagai mantan Direktur Eksekutif KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), kini meski sudah tidak lagi di KontraS, Haris masih aktif di lembaga sejenis yang bernama Lokataru sebuah lembaga yang bergerak di bidang hukum dan HAM. Lantas bagaimana kiprahnya di tempat baru, dan perjalanan karirnya dari – saat – dan setelah di KontraS?



Berkata tanpa sisa

Bagi sebagian orang yang sering menonton acara *talkshow* politik, mungkin telah sering melihat pria berkeperawakan Arab-Pakistan dengan postur tinggi, besar, dan berkacamata itu di layar televisi. Ya, nama Haris Azhar memang sudah melekat sebagai aktivis, pengamat masalah hukum, politik, dan HAM. Bahkan beberapa kasus masalah HAM dan orang hilang, ia kerap aktif berkomentar di media cetak maupun media sosial.

Haris tidak pernah gentar sedikit pun saat beberapa sikap dan langkahnya tentu banyak mengundang kontroversi bahkan ancaman nyawa-nya sekali pun. Ia tetap berjuang, menyuarakan kaum lemah yang HAM-nya telah dirampas dan tertindas.

Nama Haris sebenarnya lebih terkenal di lembaga bernama KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), selama kurang lebih 17 tahun bergelut di lembaga yang membesarkan namanya, bahkan sejak begitu lulus dari strata satu di Fakultas Hukum Trisakti, Haris telah memilih mengabdikan ilmu pengetahuannya di KontraS. “Memutuskan untuk bergabung di KontraS adalah cara saya untuk menyalurkan *passion* saya. Saya bisa berkata A apabila A, saya juga bisa berani berkata tanpa ada sisa (dirahasiakan), begitulah seharusnya menjadi aktivis dan peneliti,” ujar Haris.

Kepada Media BPP, Haris banyak cerita tentang pengalamannya sebelum dan semasa di KontraS. Ia pernah keluar masuk perguruan tinggi, bahkan hingga empat kampus. Dari situ ia justru melewati banyak proses dalam hidupnya. “Saya kuliah di 4 kampus. Saya pernah kuliah di Trisakti lulus pada 1999, sebelumnya saya juga pernah kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di UT (Universitas

Terbuka) Jakarta tapi karena tidak ada duit, saya berhenti di semester 4. Lalu baru melanjutkan di Trisakti, pernah juga S2 di UI pada 2001 tapi *nggak* sampai lulus juga, pernah juga dapat beasiswa di Inggris bidang HAM Teori dan Praktik di University of Essex, Inggris pada 2008-2009 (lulus),” terangnya.

Meski banyak keluar masuk perguruan tinggi, tapi untuk lembaga dan pekerjaan kemasyarakatan Haris cukup komitmen mengabdikan, meski terkendala masalah *financial*. “Awal masuk KontraS itu saya jadi kontributor selama 7 bulan *nggak* dibayar,” katanya.

Belajar dari Munir

Meski tidak dibayar, Haris tetap merasa *passion*-nya tersalurkan melalui lembaga yang membesarkan namanya itu. Bukan tanpa alasan, sebenarnya alasan dia masuk KontraS juga karena tertarik dengan bidang HAM yang pernah diajarkan oleh aktivis HAM, Alm. Munir. “Awal masuk KontraS saya sebetulnya tidak terlalu memahami isu HAM, tapi karena diajak Mas Munir dulu, dan saya banyak belajar dari dia tentang masalah HAM yang selama ini ternyata begitu kompleks ya di Indonesia,” imbuhnya.

Munir adalah sosok yang menginspirasi Haris untuk tetap bertahan membela kaum yang lemah dalam kasus pelanggaran HAM selain sosok ibunya yang sangat idealis. “Sebelum di KontraS saya kenal Munir sejak zaman kuliah, lalu dia ngajak saya untuk gabung di KontraS. Sebetulnya kami juga ada rencana mau membukukan semua hasil tulisannya, tapi dia keburu sudah dieksekusi (meninggal),” ungkapnya.

Dari sosok Munir dia banyak belajar dari kasus HAM, yang bahkan menyimpannya sendiri. Terbukti, sepanjang mengabdikan di KontraS, dia telah menganjurkan isu-isu hak asasi manusia di Indonesia dan Asia Tenggara, dan membela berbagai kasus/masalah hak asasi manusia.

Selain itu, ia juga secara aktif berperan dalam banyak tuntutan hukum dan litigasi kepentingan publik, acara, kampanye, penulisan publikasi dalam mempromosikan dan membela isu-isu hak asasi manusia. Pada 2012-2015; Haris menjadi anggota Komite Eksekutif Forum-ASIA (organisasi hak asasi manusia Asia); dan menjadi Wakil Ketua INFID-Indonesia (2014-2017).

Di bawah masa jabatan Haris, KontraS mendapatkan penghargaan Emilio Mignone Human Rights Award 2012 oleh Pemerintah dan LSM Argentina yang disebut CLES, dan Certificate

Internasional oleh Pemerintah Prancis.

Mendirikan Lokataru

Pasca 17 tahun di KontraS, Haris kini mencoba mendirikan lembaga baru bersama alumni beberapa LSM lainnya. “Lokataru ini *kan* yang dirikan ada 2 alumni KontraS juga, alumni LBH, alumni Elsam, dan rata-rata memang mantan direktur LSM, karena semangat mendirikan Lokataru ini kita tidak mau mengulangi apa yang di lembaga kita, jadi lebih memberikan dukungan kepada masyarakat, memperkaya khasanah lewat tindakan dan agenda,” ceritanya.

Di lembaga yang baru terbentuk pada Mei 2017 ini dia tidak mau terlalu fokus kampanye tapi mencoba mengajak pemikiran alternatif untuk menemukan korban dengan komunitas masyarakat, swasta, dan pemerintah. “Dari Lokataru ini, kita bisa bilang bahwa sebenarnya ada *lho* caranya kalau mau,” katanya.

Dari Lokataru, Haris dan kawan-kawan sebenarnya tidak mau bergantung pada lembaga donor, dia lebih suka secara mandiri dan tergantung sama permintaan klien. “Karena kami tidak pakai lembaga donor maka kami mengandalkan dari permintaan klien,” ungkapnya.

Tidak hanya menangani kasus per orang atau lembaga, sebenarnya baik Lokataru dan KontraS juga banyak melakukan penelitian terkait isu hukum dan HAM yang telah banyak dipublikasikan di media. “Kami juga riset, jadi di sini ini per orangnya bisa sedang mengerjakan 1-2 riset, baik secara tim atau sendiri. Risetnya beragam, karena memang di sini ada sebagian mahasiswa saya juga yang sedang magang, dan mereka terbiasa dengan kultur riset,” papar Haris yang juga menjabat sebagai dosen di Universitas Trisakti. (IFR)

“**DI LEMBAGA YANG BARU TERBENTUK PADA MEI 2017 INI DIA TIDAK MAU TERLALU FOKUS KAMPANYE TAPI MENCoba MENGAJAK PEMIKIRAN ALTERNATIF UNTUK MENEMUKAN KORBAN DENGAN KOMUNITAS MASYARAKAT, SWASTA, DAN PEMERINTAH**”

of recognition oleh AMAN [selama peringatan ulang tahun AMAN ke-20, 2011] atas kontraS mengenai bidang perdamaian dan hak asasi manusia; sementara dirinya dianugerahi “The New Generation is in Action” oleh Jakarta Base, I-Radio pada tahun 2014, dan The Best Activist Award oleh I-News TV (2015). Di tahun yang sama, ia juga bergabung dengan sebuah program yang disebut “Berdiri dengan Masyarakat Sipil” yang diprakarsai oleh Presiden Obama, di bawah Program IVLP, dan pada 2015, ia berpartisipasi dalam Program Pemimpin Masa Depan

PILKADA 2018 HARUS LEBIH BAIK, BEBAS DARI UJARAN KEBENCIAN

JAKARTA- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap, pemilihan kepala daerah serentak pada 2018, harus lebih baik dari sebelumnya. Pesta demokrasi ini, harus lebih berkualitas. Bebas *hoax* dan ujaran kebencian.

“Peran media massa perlu dioptimalkan untuk Pilkada yang lebih baik, sehingga tidak dimanfaatkan untuk menyebarkan *hoax* oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlu bersinergi dengan asosiasi media-media,” kata Tjahjo.

Pemerintah sendiri, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Tjahjo, telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2017. Ada beberapa catatan dari hasil evaluasi tersebut. Catatan pertama, Pilkada serentak 2017, diikuti 101 daerah, dengan rincian 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Pemilihan serentak kemarin, melibatkan 44,4 juta pemilih, dengan total biaya APBD 5,8 triliun.

“Pilkada diikuti 310 pasangan calon dengan rincian 24 cagub dan wagub, 236 calon bupati dan calon wakilnya, 50 calon walikota dan wakilnya. Dan jumlah pasangan tunggal meningkat dari 3 pasangan pada 2015, menjadi 9 pasangan di 2017,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Tjahjo, dari sisi tingkat partisipasi juga meningkat tajam. Rata-rata tingkat partisipasi mencapai 74,2 %, dibanding tahun 2015 yang hanya sampai pada angka 65-70%. Selain itu, secara umum, Pilkada berjalan sukses dan terjadi lonjakan tingkat partisipasi yang tinggi pada beberapa daerah, misalnya DKI Jakarta

“Walaupun berjalan lancar, terjadi PSU di 71 TPS, serta konflik pasca Pilkada pada 5 kabupaten di Papua,” katanya.

Catatan lain dari hasil evaluasi Pilkada serentak 2017, animo masyarakat terhadap Pilkada meningkat. Walau pada beberapa daerah masih masih terkendala dengan e-KTP. Kebijakan surat keterangan atau Suket cukup efektif untuk mengatasinya. Catatan lainnya, dari 310 pasangan calon yang berkompetisi, masih belum berkembang budaya siap kalah dan siap menang. “Terjadi PSU pada 71 TPS, serta mengerahkan massa tidak menerima kekalahan yang anarkis,” tegasnya.

Menghadapi pemilihan serentak serupa pada 2018, ujar Tjahjo, diperlukan penguatan integritas dan kapasitas penyelenggara. Karena faktanya sebanyak 37 pengaduan ke

DKPP, terkait dengan penyelenggara. Selain itu, parpol juga harus memberikan pendidikan politik yang lebih baik. “Dari 310 pasangan calon, 241 diusung parpol, 69 pasangan calon tidak melalui parpol. Jumlah ini meningkat dari tahun 2015,” kata dia.

Tjahjo menambahkan, dukungan pemerintah untuk memetakan potensi konflik dan identifikasi kerawanan pra dan pasca pilkada, terus dioptimalkan. Serta yang tak kalah penting, memperkuat koordinasi dengan BIN dan kepolisian di daerah. “Terkait dengan berkembangnya perilaku *hoax* dan antisipasi isu SARA yang akan mengganggu kualitas Pilkada 2018, dapat diambil beberapa langkah,” ungkapnya.

Langkah pertama, kata dia, memetakan secara detail wilayah-wilayah yang media sosialnya berperan aktif dan jumlahnya banyak. Langkah kedua, sinergi dengan ahli IT. Ini sangat penting untuk melakukan blokir terhadap media-media abal-abal yang sering menebar fitnah dan kebohongan. Langkah ketiga, mendorong Pemda untuk mengalokasikan dukungan dana yang proporsional untuk sosialisasi Pilkada yang bermartabat. Langkah keempat, para pasangan harus gencar mempublikasikan gagasan dan idenya melalui media dengan berpedoman pada RPJMD yang ada.

“Langkah lainnya, penyelenggara bersama pemerintah harus merangkul tokoh-tokoh masyarakat, untuk menjaga netralitas ASN. Juga harus ada sanksi yang nyata dan riil terhadap pelanggaran netralitas ASN oleh pemerintah, sebagai shock therapy bagi ASN lainnya,” tutur Tjahjo. (Puspen Kemendagri)



MENDAGRI TEGASKAN PERPPU ORMAS UNTUK TEGAKKAN IDEOLOGI BANGSA

SUMEDANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengapresiasi sikap DPR atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Meski suara fraksi-fraksi di DPR tak bulat, namun Tjahjo memastikan pemerintah menghargai upaya para wakil rakyat untuk menuntaskan pembahasan Perppu Ormas hingga paripurna pada 24 Oktober mendatang.

“Secara prinsip pemerintah mengapresiasi. Walau seluruh fraksi tak bulat tapi pada prinsipnya DPR sebagai bagian dari perwakilan masyarakat melalui fraksinya sepakat membahas sampai tuntas,” ujar Tjahjo usai mendampingi Menko Polhukam Wiranto mengukuhkan 1.544 praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (17/10).

Menurut Tjahjo, pemerintah akan menghargai apa pun keputusan DPR atas Perppu Ormas. “Soal nanti keputusan politik fraksi (setuju atau tidak terhadap perppu,red) pemerintah menghargai apa pun yang diputuskan,” tuturnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR mengadakan rapat dengan Tjahjo dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Senin (16/10) guna membahas Perppu Ormas. Rapat itu juga membahas pertanggungjawaban penerbitan Perppu Ormas oleh pemerintah.

Menurut Tjahjo, pada rapat tersebut hanya Fraksi Partai Gerindra yang menolak membahas Perppu Ormas sebelum dibawa pada rapat paripurna. Sementara sejumlah fraksi lainnya setuju untuk dibahas kembali.

“Jadi ada yang langsung menerima, ada yang menunggu dialog dulu. Termasuk ingin mendengarkan dari Kapolri, Kepala BIN, Kejaksaan dan Panglima TNI. Kemudian pada akhir putusannya walaupun menolak tapi siap untuk ikut membahas pada tahap kedua,” ucap Tjahjo.

Mantan sekretaris jenderal PDI Perjuangan itu kembali menegaskan bahwa Perppu Ormas hadir untuk melindungi NKRI seutuhnya. Sebab, ormas di Indonesia tak boleh bertentangan dengan Pancasila.



“Memang paham-paham lain di aturan tentang ormas yang tak boleh itu disebut komunisme, leninisme. Tapi juga ada disebut paham-paham lain. Nah inilah yang muncul menolak Pancasila. Intinya pemerintah siap menjelaskan baik di DPR maupun MK (Mahkamah Konstitusi, red) bahwa ini negara ada aturannya. Negara memberikan kebebasan masyarakat berserikat, berhimpun, tapi sebagai ormas, sebagai WNI harus tunduk pada aturan negara,” pungkas Tjahjo.

Masyarakat dan pihak yang mencurigai kewenangan Perppu tak perlu khawatir. Tjahjo menjamin hanya organisasi semacam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) lah yang akan dibubarkan. Organisasi itu jelas melanggar karena menghendaki sistem pemerintahan khilafah.

HTI juga terbukti ingin menghapus sistem tata negara Indonesia. Salah satu bukti yang dipegang pengambil kebijakan ialah rekaman Muktamar HTI 2013 di Gelora Bung Karno. Ada orasi berisi ajakan meninggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah dan menegakkan syariat Islam di Tanah Air.

Penindakan ormas, terang Tjahjo, didahului bukti otentik dan jelas. Terutama, pengkategorian ormas mengancam ideologi atau tidak.

“Negara memberikan kebebasan masyarakat untuk berserikat berhimpun, tetapi sebagai ormas, sebagai warga negara, dia harus tunduk pada aturan negara,” tegas bekas Sekjen PDI Perjuangan itu. (Diolah Dari Berbagai Sumber)

Meski Kecil, Kuaci Mengandung Banyak Manfaat

Tentu tidak banyak orang yang tahu, camilan sejenis kacang-kacangan yang bentuknya super mini ini ternyata mengandung banyak manfaat lho. Mulai dari rematik sampai kanker bisa dicegah dengan kuaci. Namun sayangnya, banyak sebagian penyuka biji bunga matahari ini hanya mengkonsumsinya sebagai camilan dan jarang diolah menjadi aneka bentuk panganan lain. Padahal, ada ragam sekali manfaat kuaci seperti yang dilansir dari Tabloid Nova di bawah ini:

MENCEGAH KANKER

Selenium adalah nutrisi penting dalam kuaci yang terkenal sebagai musuh kanker. Zat ini bisa mengendalikan kerusakan sel, sehingga memainkan peran esensial untuk mencegah kanker.

Studi menunjukkan bahwa nutrisi yang ditemukan dalam kuaci terbukti dapat menunda fase awal perkembangan kanker dan membantu mematikan pertumbuhan tumor. Antioksidan yang ditemukan dalam biji bunga matahari itu dapat bermanfaat untuk perbaikan DNA dan bekerja untuk memperlambat pertumbuhan sel kanker bermutasi.

MENJAGA KESEHATAN TULANG

Selain kalsium, tulang juga memerlukan magnesium dan tembaga untuk tetap kuat. Nah, di dalam kuaci mengandung kedua mineral tersebut. Bonusnya lagi,

kuaci juga mengandung vitamin E yang bisa membantu mengurangi rasa sakit dari rematik.

MENINGKATKAN KESEHATAN JANTUNG

Biji bunga matahari mengandung dua nutrisi untuk kesehatan jantung yaitu Vitamin E dan folat. Dalam takaran seperempat cangkir biji bunga matahari dapat memenuhi 60 persen kebutuhan harian tubuh akan vitamin E.

Kecukupan akan vitamin E ini dipercaya dapat menurunkan risiko kematian karena penyakit jantung. Selain itu, kandungan folat dalam kuaci juga telah terbukti meningkatkan kesehatan jantung untuk semua usia mulai bayi sampai lansia.

MENINGKATKAN KOLESTROL BAIK (HDL)

Kuaci atau biji bunga matahari juga kaya akan fitosterol. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa fitosterol berfungsi meningkatkan kadar kolesterol baik (HDL) dalam tubuh.

MEMPERBAIKI MOOD

Kuaci juga bisa memperbaiki *mood*, karena mengandung magnesium yang terkenal bisa menenangkan saraf, sehingga mengurangi menghilangkan stres, migrain, dan membuat tubuh rileks.

Saking ampuhnya, magnesium juga diberikan kepada pasien yang menderita depresi sehingga banyak digunakan untuk terapi homeopati untuk kesehatan mental. Bagaimana, masih meragukan manfaat dari kecilnya kuaci? (IFR/Tabloid Nova)

Ilmuwan Ciptakan Makanan Berbahan Listrik

Untuk pertama kalinya, para peneliti di Amerika Serikat sukses mengedit gen pada embrio manusia. Kesuksesan ini membuka era baru dunia medis yang kontroversial.

Baru-baru ini, peneliti Finlandia berhasil menciptakan makanan dari sekumpulan protein sel tunggal bergizi menggunakan sistem yang didukung oleh energi terbarukan. Hanya dibutuhkan listrik, air, karbon dioksida, dan mikroba untuk membentuk makanan ini.

Makanan sintesis ini diciptakan sebagai bagian dari proyek Food From Electricity, yang merupakan kolaborasi antara Lappeenranta University of Technology (LUT) dan VTT Technical Research Centre di Finlandia.

Setelah menampakkan bahan baku elektrolisa dalam bioreaktor, proses tersebut menghasilkan serbuk yang terdiri dari lebih dari 50 persen protein dan 25 persen karbohidrat. Tekstur serbuk dapat diubah dengan menggunakan mikroba yang digunakan dalam produksi.

Dalam siaran pers LUT, Pitkanen (peneliti Finlandia) itu berkata, "Saat ini kami fokus pada pengembangan teknologi: konsep reaktor, teknologi, peningkatan efisiensi, dan pengendalian proses," ungkapnya

Menurutnya, butuh satu dekade untuk menyediakan sistem yang lebih efisien secara luas. "Mungkin 10 tahun adalah waktu yang realistis untuk mencapai kapasitas komersial, dalam hal peraturan perundang-undangan dan teknologi proses yang diperlukan," ujarnya.

Lalu apa manfaatnya?

Manfaat dari "makanan listrik" ini sangatlah besar. Pertama, sebagai makanan alternatif bagi orang yang kelaparan dan menyediakan sumber makanan di daerah yang tidak sesuai dengan produksi pertanian.

Pitkanen mengatakan, makanan ini akan bermanfaat di daerah yang rawan kelaparan atau padang pasir. Tanpa mengeluarkan biaya yang besar, mereka yang membutuhkan dapat menikmati makanan bergizi ini.

Mesin yang digunakan juga bekerja secara independen dari faktor lingkungan. Itu berarti, dalam makanan ini tidak bergantung pada kondisi tertentu untuk dapat mempertahankan gizinya.

Kedua, makanan ini dapat menurunkan emisi global. Dengan adanya hal ini, permintaan akan makanan ternak dan hasil panen akan berkurang. Saat ini, industri daging menyumbang 14 sampai 18 persen emisi gas rumah kaca global dan menyita lahan yang seharusnya dapat digunakan untuk tujuan lain.

Dengan adanya makanan dari listrik, jumlah pertanian yang tidak berkelanjutan akan berkurang, dengan metode nutrisi baru yang lebih murah dan terbarukan.

Di samping makanan bersumber listrik, ada solusi positif lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus kelaparan, seperti budidaya daging atau peternakan serangga. Selain menghasilkan sedikit limbah, metode ini juga hanya membutuhkan sedikit energi. Jadi bagaimana? Penasaran untuk mencoba? (IFR/National Geographic)





Marlina: The Murderer in Four Acts
Sutradara: Mouly Surya
Pemain: Marsha Timothy
 Dea Panendra
 Yoga Pratama
 Egi Fedly
Produser: Rama Adi, Fauzan Zidni
Produksi: Cinesurya
Tayang: November 2017
Durasi: 90 menit



Marlina Si Pembunuh dari Timur



Suatu hari di sebuah Padang Sabana Sumba, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, sekawanan tujuh perampok mendatangi rumah seorang janda bernama Marlina (Marsha Timothy). Mereka mengancam nyawa, harta dan juga kehormatan Marlina dihadapan suaminya yang sudah berbentuk mumi yang duduk di pojok ruangan rumah Marlina.

"Kau orang mau apa datang kemari," kata Marlina

"Mau mengambil harta kau, pener-nakan kau. Dan kalau ada waktu, ti-dur dengan kau, kami bertujuh," kata Markus, bos perampok yang dipe-rankan oleh Egi Fedly.

Dalam sebuah *trailernya*, Marlina di-gambarkan sebagai sosok janda yang tenang, introvert, dan pemberani. Saat datang kawanan rampok itu, ia dengan santainya masih menyambut kedatangan kawanan rampok yang hadir dalam gubuknya yang kecil di

tengah padang rumput Sumba, NTT. Bahkan Marlina masih menyajikan sup ayam dan berdandan cantik sebelum hendak ditiduri.

Meski begitu, Marlina bukan per-empuan bodoh, dengan cara tenang seperti itu pula ia juga berusaha pertanahan diri dengan membunuh kawanan rampok itu dengan pedang tajam yang sudah ia siapkan. Ia bahkan dengan keji memanggal kepala Markus, bos perampok itu.

Keesokan harinya dalam sebuah per-jalanan demi mencari keadilan dan penebusan, Marlina membawa kepa-la dari bos perampok yang ia peng-gal tadi malam. Ia bertemu dengan sahabatnya Novi (Dea Panendra) yang sedang menunggu hamil tua akibat hubungan gelapnya dengan Franz (Yoga Pratama), kekasihnya. Novi ingin Marlina ikut ke gereja dan melakukan pengakuan dosa serta mengembalikan potongan kepala Markus, yang selalu ia bawa kema-na-mana.

Namun, Marlina tetap *kekeuh* melaku-kan perjalanan ke kantor polisi di pusat kota, mencari keadilan buat dirinya.

Dalam perjalanan yang panjang sam-bil membawa kepala bos perampok itu, Marlina menemukan petualang panjang dan bertemu dengan ba-nyak orang. Lalu mampukah Marlina mendapatkan keadilan yang dia ingin-kan? Saksikan film ini pada 12 Oktober mendatang di bioskop Indonesia.

Meski baru diputar pada Oktober mendatang di Indonesia, film ini sudah banyak diputar dan dikenal oleh ber-bagai negara. Cinefondation L'Atelier, sebuah *project market* yang menjadi bagian dari Cannes Film Festival memi-lih Marlina *The Murderer in Four Acts*, proyek film terbaru dari sutradara In-donesia Mouly Surya sebagai satu dari 15 proyek film dari seluruh dunia yang mencari mitra *co-production*, *sales agent*, dan distribusi internasional.

L'Atelier merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari festival film paling bergengsi di dunia ini. Tahun ini menandakan ke-69 kalinya festival yang diadakan di Perancis bagian se-

latan ini. Mouly Surya menjadi satu-sa-tunya sutradara yang terseleksi dari Asia Tenggara tahun ini.

Cerita *Marlina The Murderer in Four Acts* ini ditulis oleh Mouly Surya dan Rama Adi dengan ide cerita dari Garin Nugroho. Film ini diproduksi oleh Rama Adi dan Fauzan Zidni. Rumah produksi Cinesurya Pictures bekerja sama dengan Kaninga Pictures dalam proyek ini atas kesamaan visi untuk memproduksi film Indonesia yang berkualitas.

Proyek *Marlina The Murderer in Four Acts* sebelumnya masuk seleksi *Asian Project Market (APM)* di Busan International Film Festival 2015, dan juga terpilih sebagai salah satu penerima *Next Masters Support Program* dari ajang Talents Tokyo 2015.

Sebelum lolos seleksi untuk diputar di TIFF, film *Marlina* juga sudah tayang dalam Melbourne International Film Festival dan New Zealand Film Festival pada Agustus ini. Setelah berkeliling dari festival ke festival, baru film terse-but akan pulang kampung alias tayang perdana di Indonesia pada Oktober

mendatang.

Film ini menjadi salah satu film yang wajib ditonton oleh masyarakat In-donesia, bagaimana tidak? Setelah 12 tahun Indonesia vakum dari ajang cinemas internasional di Cannes, Pe-rancis. Tentu ini menjadi ajang ke-banggaan tersendiri bagi karya cineas bangsa, karena bisa tampil dalam ajang bergengsi dengan jumlah pendaftar 2.000 film seluruh dunia, dan dihadiri oleh 5.000 jurnalis, serta 30 ribu profes-sional perfilman.

Tentu di Indonesia sendiri, film ini juga didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya RI, karena dalam film ini juga mengenalkan bagaimana budaya Indonesia Timur (Sumba) dengan logat bahasanya yang kental, dan keinda-hannya yang belum banyak diketahui orang.

Dari film ini, kita bisa belajar dari so-sok Marlina yang teguh, berani, dan berjuang keras mencari keadilan serta mengenal bagaimana kehidupan dari salah satu bagian Indonesia yang ber-nama Sumba, Nusa Tenggara Timur. (IFR)

MENJAWAB KERAGUAN PENGELOLA JURNAL ILMIAH

Buku ini mengungkap cara yang paling tepat mengelola jurnal ilmiah. Lukman dkk menawarkan solusi paling efektif serta berusaha membantu para pengelola jurnal semakin siap dalam mengelola terbitan jurnal secara elektronik sebagai respons atas terbitnya Perka LIPI No 3 Tahun 2014 dan Dirjen Dikti No 1 Tahun 2014.

Mengapa banyak pengelola jurnal merasa kesulitan ketika hendak melakukan akreditasi? Mengapa peraturan yang mewajibkan pengelola jurnal harus migrasi ke jurnal elektronik dianggap menjadi momok yang menakutkan pengelola yang terbiasa mengelola jurnal cetak? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi dasar Lukman dkk (penulis buku) menerbitkan buku ini. Lukman dkk melihat masalah yang muncul seperti sulitnya terakreditasi dan mengelola jurnal elektronik dikarenakan, pengelola tidak mengetahui manajemen pengelolaan jurnal yang baik, yang sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang paling efektif.

Ekspektasi buku ini adalah, dengan pengelolaan jurnal yang baik dan mengikuti peraturan yang ditetapkan, serta pengelolaan yang sederhana dan dapat dipahami, pengelola jurnal tidak akan kesulitan ketika mengajukan akreditasi bahkan lebih jauh bisa terakreditasi nasional dan bereputasi internasional.

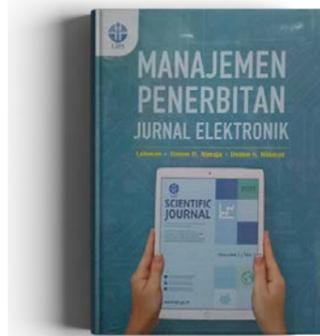
Dikeluarkannya Perka LIPI No 3 Tahun 2014 dan Dirjen Dikti No 1 Tahun 2014 terkait terbitan berkala ilmiah yang menekankan, jurnal yang diakreditasi mulai 2014 dan efektif mulai 1 April 2016 harus terbit dalam bentuk elektronik tentu berimbas pada perubahan paradigma para pengelola jurnal untuk beralih ke penerbitan jurnal elektronik. Tidak jarang penulis, maupun *reviewer*, khususnya para pengelola kebingungan serta mengundang banyak pertanyaan terkait pengelolaannya.

Dalam buku ini Lukman dkk berusaha menghadirkan pemahaman pengelolaan jurnal dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Lukman dkk mengulas secara runut setidaknya empat hal terkait paradigma jurnal elektronik.

Pertama, terkait kriteria dan kualitas

jurnal ilmiah. Pada bab ini diulas tentang paradigma penerbitan jurnal ilmiah dari cetak ke elektronik. Migrasi jurnal elektronik mendesak dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi. Sudah saatnya hasil-hasil penelitian tidak hanya dinikmati segelintir orang, namun bisa dinikmati orang banyak. Pada bab ini dijelaskan klasifikasi jurnal, kualitas sebuah jurnal hingga diulas jurnal-jurnal yang dianggap palsu dan predator namun berskala internasional.

Kedua, selain memberikan pemahaman terkait standar dasar akreditasi jurnal elektronik, Lukman dkk juga menawarkan metode yang harus dipersiapkan dalam membangun kelembagaan dan infrastruktur jurnal elektronik. Lukman mencontohkan pengelolaan jurnal di Indonesia umumnya masih belum terintegrasi dan dikelola oleh satuan kerja, ada yang dikelola secara optimal, ada yang baru berdiri, bahkan belum ke arah instalasi jurnal.



Judul : Manajemen Penerbitan Jurnal Elektronik
Penulis : Lukman, Tinton D. Atmaja, Deden R Saleh
Penerbit: LIPI Press
Terbit : Mei 2017
Harga : Rp 51.000

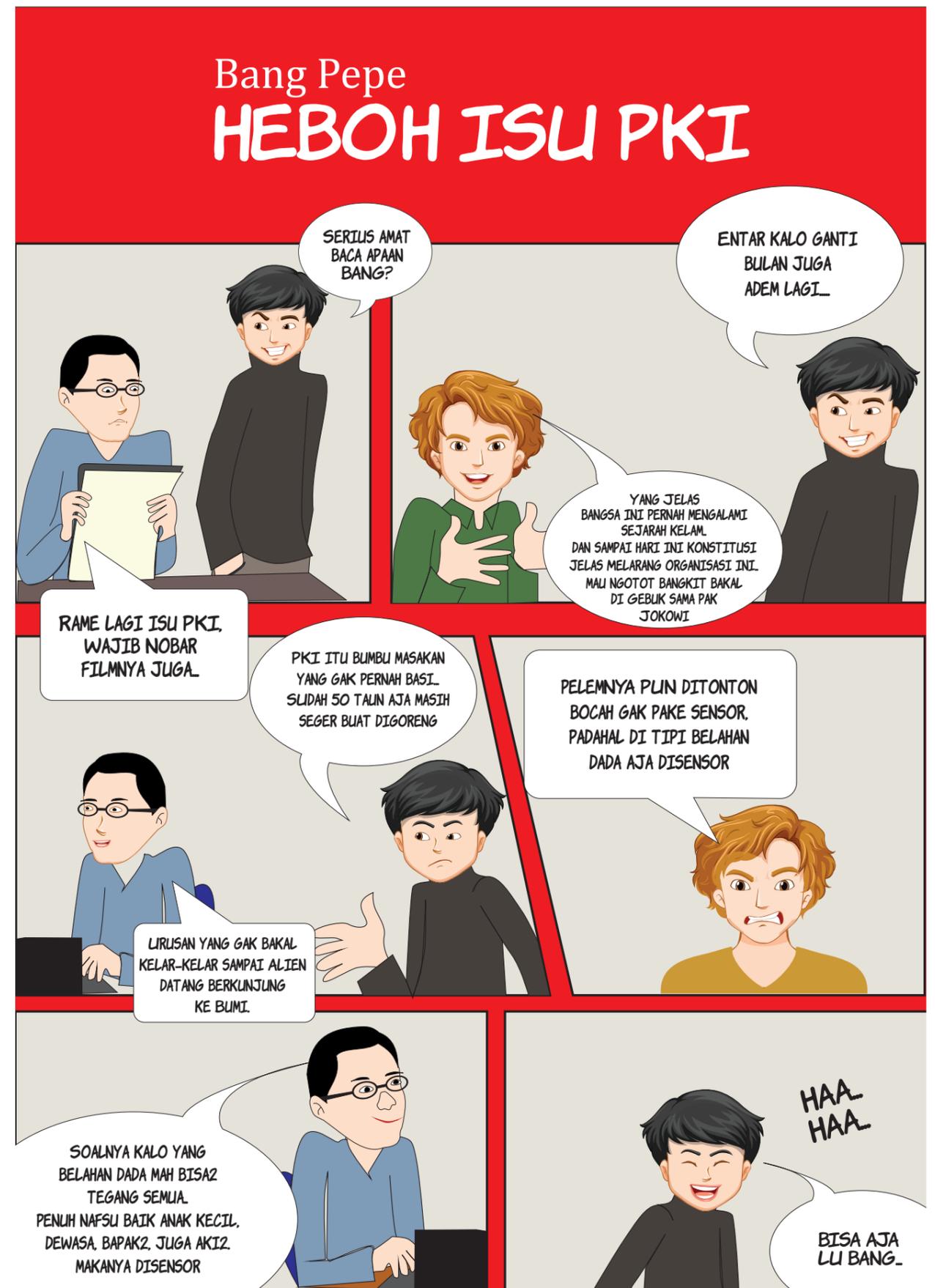
Ketiga, buku ini juga mengulas etika publikasi dan manajemen jurnal. Bagian ini menjadi bab paling menarik sekaligus menjawab beberapa pertanyaan pengelola jurnal selama ini terkait tugas orang-orang yang terlibat langsung dengan proses penerbitan jurnal. Pada bagian manajemen juga dijelaskan terkait teknis pengelolaan jurnal yang sebetulnya tidak harus dilakukan oleh tenaga IT khusus, namun bisa dilakukan pengelola dari berbagai latar belakang, karena prosesnya yang dijelaskan dengan lugas dan mudah dipahami.

Keempat, Lukman dkk menjelaskan teknis manajemen penerbitan dari mulai ketika penulis melakukan *submission* atau mengirim artikel, penerimaan naskah oleh editor, layout, hingga *proofreader*. Teknis selanjutnya adalah bagaimana agar masing-masing artikel atau naskah memiliki *Digital Object Identifier* (DOI) yang kemudian sebuah jurnal bisa diindeksasi oleh lembaga pengindeks nasional dan internasional, dan dampaknya bagi kelangsungan jurnal ilmiah dan dunia publikasi ilmiah di Indonesia.

Sebagai penutup Lukman dkk mempertegas, keberhasilan pengelolaan jurnal ilmiah dapat diukur dari produktivitas jurnal yang diterbitkan melalui statistik kunjungan akses yang transparan, serta kualitas tulisan yang dihasilkan melalui sitasi dari setiap artikel, yang diacu oleh karya tulis ilmiah lainnya, yang juga dapat dipantau.

Lukman dkk menyarankan pengelola jurnal tidak hanya menyediakan infrastruktur atau aplikasi, hal yang lebih penting adalah komitmen pengelola jurnal dan institusi lembaga penerbit jurnal untuk menjamin keberlanjutan jurnal yang diterbitkan, seperti contoh menjaga kualitas naskah yang dihasilkan.

Kehadiran buku *Manajemen Penerbitan Jurnal Elektronik* menjadi solusi di tengah minimnya buku-buku terkait teknis pengelolaan jurnal ilmiah. Sejauh ini hanya ada dua buku lainnya mengenai penerbitan jurnal ilmiah, yaitu *Manajemen Penerbitan Jurnal Ilmiah* yang diterbitkan oleh Sagung Seto dan *Penggunaan Aplikasi Jurnal Menggunakan Open Journal System* oleh Kemenristek Dikti dan PDI-LIPI yang terbit jauh sebelum buku ini terbit. Buku ini bisa dijadikan acuan baru bagi para pengelola jurnal ilmiah elektronik, pegiat Karya Tulis Ilmiah (KTI), peneliti, hingga pengelola jurnal ilmiah, pasalnya buku ini menjadi penyempurna kedua buku sebelumnya. (MSR)



Linuwih

Oleh : Muhammad Harya Ramdhoni

AKU mencintaimu, Tik. Aku ingin melamarmu.” Suara Untung menggantung di langit basah bulan Desember. Lelaki berparas budiman baru saja kembali dari Irian Barat. Berperang demi sejengkal tanah yang entah milik siapa.

Tutik menunduk. Senyumnya lenyap tak jejak. Ia bahagia mendengar ketulusan hati kekasihnya. Namun Tutik risau kepada ancaman Bu Liknya yang melarang dirinya meneruskan hubungan cintanya dengan Untung.

“Untung terlalu tua untukmu, *Nduk*. Kalian berdua lebih pantas sebagai paman dan kemenakan,” pungkas Bu Lik Koem sehari setelah keberangkatan Untung ke Irian Barat.

Tutik tahu perkataan Bu Liknya hanyalah alasan yang dibuat-buat. Cara berpikir beliau tak terjamah pola pikir modern. Ada hal buruk berkaitan dengan Untung tapi entah kapan hal itu akan terjadi. Bu Lik Koem juga tak tahu mengapa firasatnya berujar seperti itu. Itulah rerasan seorang perempuan Jawa yang rajin laku prihatin dan berhubungan dengan Tuhan secara amat pribadi. Sesuatu yang bersumber dari nurani pertama.

“Tak ada yang kupikirkan selama berbulan-bulan di belantara Irian selain engkau, Tik. Ketika payung parasutku mengembang di atas langit Manokwari wajahmu muncul di pelupuk mata. Aku berdoa agar Allah memanjangkan umurku. Agar terbayar mimpiku menggandengmu ke depan penghulu...”

Langit yang mendung membuat suasana semakin syahdu.

“Bicaralah, Tik. Jangan biarkan lidahmu kelu.”

Jawaban Tutik adalah tangis sesenggukan. Air mata berhamburan semakin deras berebut tempat di pipi Tutik.

“Kenapa, Tik? Apa yang membuatmu risau? Adalah lelaki lain yang menghampiri hatimu selama kutinggal engkau ke medan laga?”

Tutik menggeleng lemah disertai tangis yang menggiris.

“Mas... Sepertinya percintaan kita takkan berakhir dalam perkawinan...”

“Engkau telah dijodohkan, Tik?” suara Untung terdengar gemetar.

Jawabannya adalah gelengan kepala.

“Lalu apa?”

“Bu Lik Koem melarangku menikahimu, Mas.”

Untung menatap lekat-lekat wajah kekasihnya. Yang dipandang jadi salah tingkah.

“Apakah semua itu karena *weton* kelahiran kita yang

bertentangan? Kenapa Bu Likmu yang memiliki kekuasaan untuk melarang pernikahan kita? Kenapa bukan kedua orang tuamu?” Pertanyaan Untung bagai anak-anak panah menancap ulu hati Tutik.

“Kekuasaan Bu Lik Koem melampaui pengaruh ibuku sendiri. Itu terjadi sejak orang tuaku mengalihkan hak asuhku kepada beliau bertahun silam, termasuk memilih calon suami yang pantas untukku. Tapi percayalah, Mas. Larangan ini bukan karena *weton*. Bu Lik Koem

sendiri tak mampu menjelaskan mengapa beliau melarang perkawinan kita. Menurut firasatnya, perkawinan kita akan berdampak buruk bagi kehidupan keluarga kami.”

“Akibat buruk seperti apa? Aku perwira angkatan darat dengan penghasilan cukup baik dan tidak akan menjadi beban bagi keluargamu. Sedapat mungkin akan kubahagiakan dirimu seumur hidup, Tik.”

“Entahlah, Mas. Aku pun tak mengerti maksud Bu Lik Koem.”

“Aku tak bisa menerima alasan Bu Likmu. Aku akan datang melamarmu besok malam!”

“Jangan Mas. Jika Mas Untung bersikeras datang, beliau akan murka.” cegah Tuti.

“Aku tak peduli. Aku akan datang!”

Tutik risau kedatangan kekasihnya esok malam justru akan berubah jadi petaka.

Malam itu sebuah jeep militer melaju kencang dari arah Kartasura menuju Manahan. Berlomba dengan desir angin yang berhembus ke arah barat. Ditemani Moer Benny, sahabat seperjuangannya ketika perjuangan membebaskan Irian Barat, Untung datang memenuhi janjinya sebagai seorang ksatria Jawa.

“Apa yang bisa kami bantu sehingga Ananda repot-repot datang ke kediaman kami?” Bu Lik Koem yang ditemani suaminya Pak Lik Tanto membuka pembicaraan.

“Saya mencintai Tutik, Bu Lik. Saya datang kemari hendak melamar keponakan Bu Lik sebagai istri,” kata Untung tanpa basa-basi.

Suasana senyap sesaat. Udara malam bertandang tanpa malu-malu mengusik perasaan Bu Lik Koem dan Untung yang tengah menakar pikiran masing-masing. Sementara Moer Benny duduk di samping Untung dengan tangan bersidekap.

“Suatu kehormatan bagi kami sekeluarga apabila putri kami dilamar seorang perwira hebat seperti Nak Untung, peraih Bintang Sakti dari Bung Besar. Kami berterima kasih atas perhatian Ananda selama ini kepada putri kami. Akan tetapi, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Ananda, lamaran tersebut belum bisa kami terima karena Tutik masih harus menyelesaikan sekolahnya.”

Suasana kembali hening. Empat cangkir berisi teh panas meruapkan aroma wangi. Sementara suara deru motor sesekali terdengar di luar sana.

“Saya datang dengan niat baik Bu Lik....”

“Saya percaya ketulusan hati Nak Untung.”

“Masih mungkinkah bagi saya menunggu Tutik hingga lulus kuliah?”

“Saya tak berani menjamin.”

“Kalau saya boleh tahu mengapa Bu Lik tak bisa menjamin?”

“Sebab Tutik mesti menyelesaikan kuliahnya dan terikat ikatan dinas sebagai bidan,” kilah Bu Lik Koem.

“Saya tetap akan menunggu Tutik. Cinta saya untuknya tak pernah berakhir!”

“Silahkan saja. Tapi siapa yang bisa menjamin jerih payah Ananda akan berhasil. Jodoh adalah urusan Gusti Allah, Nak,” Bu Lik Koem tak mau kalah.

“Apa pun alasan yang Bu Lik kemukakan, saya tetap akan menunggu Tutik.”

“Nak Untung, saya dan suami adalah pengasuh Tutik sejak kecil. Ibunya yang merupakan *Mbakyu* saya telah menyerahkan anak ini buat-bulat kepada saya, termasuk dalam hal perjodohan. Tutik memiliki hak menentukan siapa pun lelaki yang disukainya.

Akan tetapi haknya dibatasi oleh wewenang saya sebagai wakil ayah dan ibunya. Jadi silahkan saja jika Nak Untung bersikeras menunggu Tutik. Namun seperti yang telah saya katakan tidak ada jaminan kesabaran Ananda akan membuahkan hasil.”

Pak Lik Tanto mengangguk-angguk entah sebagai isyarat setuju atau malah mengantuk. Sedangkan Moer Benny menarik napas panjang seraya mengerenyitkan keningnya.

“Sampai detik ini saya belum bisa menerima alasan Bu Lik menolak lamaran saya.”

Bu Lik Koem tersenyum penuh pengertian mendengar ketidakpuasan Untung.

“Saya paham betapa suasana batinmu begitu rusuh, Nak. Saya pun menyesal tidak bisa meluluskan niat baikmu. Oya, tehnya sudah dingin. *Monggo diunjuk*². Siapa nama kawan yang satu ini? Nak Benny, betul? Putra Pak Moerdani yang tinggal di Jalan Sindoro III?”

“Betul, Bu Lik,” jawab Moer Benny.

Sementara Untung menyesap minuman itu dengan enggan.

“Nak....”

“Saya, Bu Lik.”

“Nak Untung tentu tahu betapa berartinya sebuah firasat bagi seorang Jawa yang masih menjunjung tinggi keyakinan lama nenek moyang seperti saya.”

“SUASANA SENYAP SESAAT. UDARA MALAM BERTANDANG TANPA MALU-MALU MENGUSIK PERASAAN BU LIK KOEM DAN UNTUNG YANG TENGAH MENAKAR PIKIRAN MASING-MASING. SEMENTARA MOER BENNY DUDUK DI SAMPING UNTUNG DENGAN TANGAN BERSIDEKAP



Untung mengangguk lemah. Apa yang dituturkan kekasihnya kemarin pagi bukan omong kosong belaka.

“Saya memiliki firasat yang kurang baik berkenaan dengan hubungan Nak Untung dengan putri kami. Jika kalian sampai menikah maka, kelak keluarga besar kami akan menerima dampak buruknya.”

“Saya bekerja sebagai perwira angkatan darat dan tidak akan menyusahkan kehidupan keluarga Bu Lik.”

Bu Lik Koem tersenyum kecut, seurus kemudian ia mengangkat bahu.

“Perasaan saya tidak ada hubungannya dengan materi. Saya yakin Ananda mampu menghidupi anak kami dengan baik. Tapi saya juga yakin bahwa nasib buruk itu akan menimpa kami sekeluarga apabila membiarkan kalian berdua menikah.”

“Saya bukan dukun, Nak. Tapi perkawinan kalian harus dicegah!”

Itulah kata-kata pamungkas yang memupus impian sang mayor. Percintaan seorang perwira pemberani dengan perempuan pujaannya telah berakhir di tangan wanita setengah baya yang berperangai lembut dan terlihat tak berdaya.

“Lupakan Tutik untuk selamanya, Nak. Semua ini untuk kebaikan kita bersama. Saya doakan Nak Untung segera mendapatkan putri Solo lainnya yang lebih ayu, lebih cantik, lebih berpendidikan dan lebih segalanya dibandingkan anak kami. Maafkan kami yang tidak bisa menerima Nak Untung sebagai menantu. Kalian tidak berjudoh!”

Malam itu berakhir damai. Tanpa pertengkaran sebagaimana dikhawatirkan Tutik. Untung pulang dengan kemarahan yang tak mampu diledakkan. Moer Benny merangkul sahabatnya tanpa sepatah kata. Ia ambil alih kemudi jeep dari tangan Untung dalam perjalanan pulang menuju Kartasura. Tiada kata perpisahan terucap untuk Tutik. Hanya senyum keibuan dari Bu Lik Koem sebagai penawar hati yang telah menjadi tawar. Sementara Tutik disibuki sedu sedannya yang berubah menjadi tangis histeris. Malam itu menjadi neraka baginya. Mengapa percintaan yang tulus mesti digagalkan oleh cara berpikir tradisional dan sinkretik? Tutik, juga Untung, tak pernah menerima perlakuan itu dengan ikhlas. Kelak percintaan mereka akan menjadi pelipur lara di saat duka tiba-tiba meraja.

“BANGUN, Tik. Ada suara Untung di radio.”
Sepagi itu Bu Lik Koem telah bangunkan Tutik dari tidurnya

yang lelap.

“Mas Untung?”

“Ya, mantan pacarmu yang lamarannya Bu Lik tolak.” Bu Lik Koem tersenyum masam.

Tutik termangu di atas ranjang. “Apa yang telah terjadi sehingga Mas Untung bisa berbicara di depan radio nasional seperti seorang pejabat negara?”

Pagi itu 1 Oktober 1965 melalui RRI Pusat Jakarta Letkol Untung Syamsuri, Komandan Pasukan Pengawal Pribadi Paduka Yang Mulia (PYM) Presiden Soekarno, mengumumkan keberhasilannya menyelamatkan nyawa pimpinan negara dari ancaman kudeta Dewan Jenderal yang kontra revolusioner. Ia juga mengumumkan terbentuknya Dewan Revolusi yang mendemisioner kabinet pemerintahan sebelumnya. Kekuasaan negara pun praktis berada di tangannya.

Dalam sekejap mantan kekasihnya menjadi orang yang sangat berkuasa di seluruh negeri. Tutik baru menyadari hubungan kejadian itu dengan firasat sang Bu Lik setelah peristiwa demi peristiwa terjadi berbulan-bulan kemudian. Firasat ganjil itu menjadi penyelamat bagi dirinya dan keluarganya. Lelaki yang dulu mencintainya dengan lembut dan kebapakan kini menjadi buruan nomor satu di Indonesia. Ia dituduh mendalangi pembunuhan enam jenderal angkatan darat dan seorang perwira pertama.

Tutik bersyukur Gusti Allah telah menjauhkan keluarganya dari nasib buruk yang mungkin menimpa. Tak terbayangkan olehnya apabila dulu ia yang dipilih Gusti Allah sebagai istri Letkol Untung Bin Syamsuri. Seluruh keluarga besarnya akan terseret ke dalam nasib buruk seperti yang dialami jutaan pengikut Partai Komunis. Bagaimana mungkin ayah dan ibunya mesti turut menanggung hinaan ini? Aib bermenentukan lelaki bejat penghisap darah para jenderal. Duka cita terdalam juga akan dialami Bu Lik Koem dan Pak Lik Tanto yang mengasuhnya sejak kecil tanpa pamrih. Olok-olok Bu Lik Koem bahwa nama Untung bermakna buntung memang benar adanya. Nama itu tak seberuntung nasibnya yang menyedihkan.

¹ Kemampuan spiritual seorang manusia untuk mengetahui hal-hal yang akan terjadi di masa depan dalam kepercayaan mistisme Jawa kuno yang berindukkan pada ajaran kejawen.

² Silahkan diminum, bahasa Jawa Solo.

TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP PEMERINTAH DI BEBERAPA NEGARA

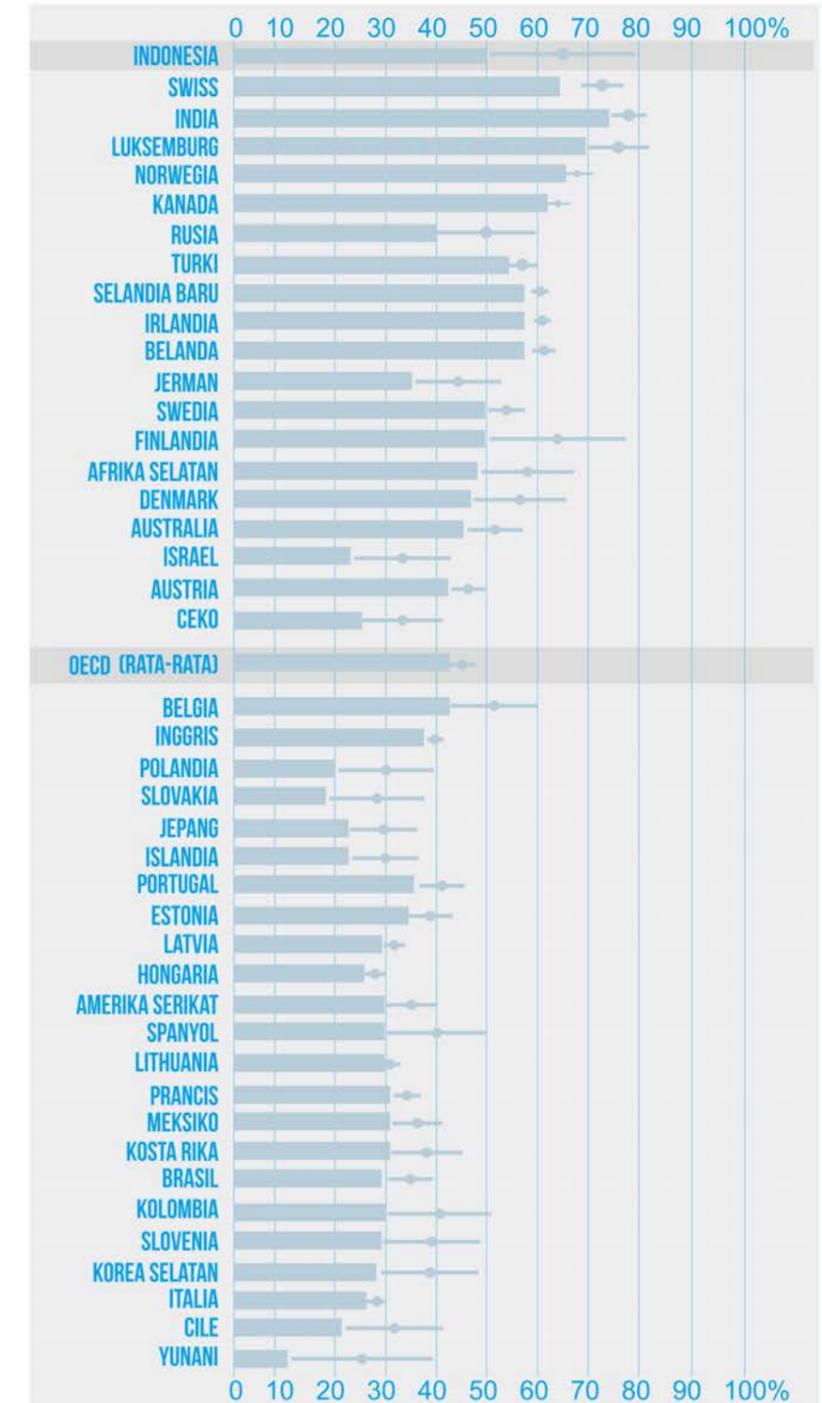
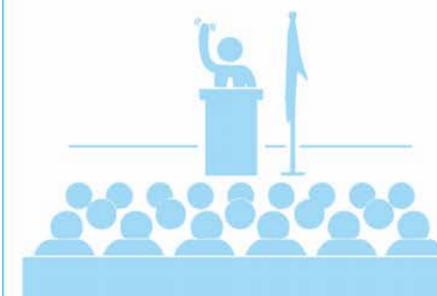
Berikut hasil laporan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah

Presentase jawaban 'Ya' atas pertanyaan 'Apakah Anda memiliki kepercayaan terhadap pemerintahan nasional?'

- Negara OECD
- Negara mitra OECD

Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja para Menteri dalam meningkatkan kepercayaan publik kepada Pemerintah

Hal itu terbukti dengan ditematkannya Indonesia pada posisi pertama dalam survei negara-negara dengan kepercayaan publik tertinggi yang dirilis Gallup World Poll (GWP)



Opini Sitti Aminah

SAATNYA ASN MELEK LITERASI

Tidak diragukan, masyarakat dengan tingkat literasi tinggi memiliki tingkat kemakmuran yang juga tinggi. Hasil survey pemeringkatan literasi yang dirilis oleh The World's Most Literate Nations (WMLN) Tahun 2016, negara dengan masyarakat yang mempunyai tingkat literasi tinggi seperti Finlandia, New Zealand, Norwegia, Switzerland, Denmark dan Swedia. Di waktu yang sama, kelima negara ini memiliki peringkat indeks prospektif atau kemakmuran yang juga tinggi, sesuai riset yang dilakukan Legatum Prosperity Institute pada 2016.

Sebagai ilustrasi, Finlandia merupakan negara yang gencar membangun budaya literasi di kalangan masyarakat dan birokrasi mereka. Tradisi membaca dibangun sejak dini, sejak masa anak-anak, rata-rata orang Finlandia membaca 178 buku setahun. Negeri ini menjadi negeri penerbit buku terbanyak dibanding negeri manapun dan menjadi salah satu negeri termakmur di dunia.

Posisi tingkat literasi di Indonesia berada pada peringkat ke 60 dari 61 negara sesuai hasil survey WMLN di atas. Sementara itu data statistik UNESCO pada 2014 menyebutkan indeks minat baca di Indonesia mencapai 0,001. Artinya,

setiap 1.000 penduduk, hanya satu orang saja yang memiliki minat baca. Sejalan dengan tingkat literasi yang rendah, indeks kemakmuran masyarakat juga berada di peringkat 60. Fakta ini cukup memprihatinkan, karena bangsa kita tertinggal dari bangsa lain dari aspek literasi dan kemakmuran rakyat.

Upaya pengembangan budaya literasi di komponen bangsa harus menjadi prioritas, tidak hanya di masyarakat, sekolah dan perguruan tinggi, tapi harus menyentuh kelembagaan birokrasi pemerintah. Mengapa? Karena di birokrasi terdapat sumberdaya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memainkan peranan penting dalam proses perubahan di masyarakat. Mereka adalah orang-orang terpelajar dan terdidik yang berperan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Di pundak ASN-lah terdapat tanggung jawab moral yang tinggi untuk bekerja secara profesional. Membangun budaya literasi di kalangan ASN merupakan langkah strategis menciptakan kemakmuran rakyat.

Sehingga, membudayakan literasi di kalangan



ASN berguna untuk meningkatkan kemampuan mereka berpikir kritis, memiliki *sense of crisis* dan kewaspadaan, mampu berpikir secara kreatif mencari solusi terhadap berbagai persoalan, dan tentu saja memiliki kemampuan berpikir *out of the box* dan inovatif.

Sayangnya, minat membaca ASN saat ini tergolong rendah. Jika diamati, sebagian besar ASN tidak membangun kebiasaan membaca di tempat kerja. Mereka jarang memanfaatkan waktu untuk membaca. Termasuk membaca regulasi peraturan perundangan. Tak heran jika pemahaman mereka tentang regulasi dan isu-isu kebijakan juga rendah. Banyak pegawai sering lebih asik berselancar melalui media sosial seperti *Whatsapp*, *facebook*, *instagram*, *youtube* atau media lainnya ketimbang membaca buku, jurnal ilmiah atau surat kabar. Padahal media dimaksud meski menjadi sarana berbagi informasi yang efektif, namun kerap memiliki kelemahan mendasar pada aspek akurasi dan validitas bahkan sering berupa kabar *hoax*.

Membangun budaya literasi di kalangan ASN bukanlah hal yang sulit. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa mayoritas dari ASN adalah kaum terdidik dan banyak di antara merupakan lulusan terbaik dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Skripsi, tesis dan disertasi dan berbagai karya tulis tidak mungkin disusun tanpa membaca ratusan literatur dan jurnal. Minat membaca dan kemauan menulis yang rendah di kalangan ASN dapat ditingkatkan dengan mengembangkan budaya literasi di birokrasi pemerintah. Pengembangan budaya literasi diharapkan mempercepat tercapainya tujuan reformasi birokrasi yaitu meningkatkan profesionalisme ASN dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga mampu mendorong keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.

Pembentukan budaya baru tentu membutuhkan pendekatan dan strategi yang tepat. Tradisi membaca dan menulis harus ditumbuhkan pada semua ASN. Jika perlu dimulai dari sejak pertama mereka masuk dan bekerja di birokrasi pemerintah. Karena itu upaya menginternalisasikan budaya literasi dalam birokrasi harus diterjemahkan dalam praktek nyata. Misalnya dengan mewajibkan ASN di unit kerja masing-masing membuat target berapa buku atau regulasi

yang harus dibaca pegawai dalam seminggu atau sebulan. Sebenarnya dengan kemajuan teknologi informasi, tidak ada alasan tidak mempunyai waktu untuk membaca. Karena dengan kemajuan teknologi informasi, membaca buku bahkan menulis dapat dilakukan kapanpun dan dimana saja, karena banyak buku-buku gratis yang mudah diakses melalui internet. Daripada *ngobrol* di ruang kerja atau melamun di kereta atau kendaraan umum dalam perjalanan berangkat dan pulang kerja, lebih bermanfaat jika waktu tersebut digunakan untuk membaca. Kebiasaan membaca di tempat umum banyak dijumpai pada masyarakat di negara-negara maju, yang baik untuk ditiru.

Peningkatan kesadaran membaca dikalangan ASN kemudian dilanjutkan dengan mendorong kemampuan mereka untuk menulis. Misalnya, mereka diminta untuk menulis hal-hal yang berkaitan dengan tantangan dan hambatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di unit kerja masing-masing, permasalahan dan kendala penerapan regulasi dan kebijakan atau mendorong mereka untuk menulis tentang upaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Setiap ASN dapat dikembangkan kemampuan dalam menulis, anggapan bahwa menulis adalah bakat, tidak sepenuhnya benar, karena menulis adalah pembiasaan dan keahlian menulis dapat dipelajari dan dilatih.

Pelebagaan budaya literasi di kalangan ASN diterjemahkan dalam berbagai program pengembangan kapasitas sumberdaya manusia aparatur. Pengembangan budaya literasi dapat berupa mengikut sertakan pegawai dalam berbagai *training* atau pelatihan menulis, melaksanakan aneka lomba literasi, orasi literasi, mendorong untuk menulis jurnal, opini dan artikel, bedah buku, menjalin kemitraan dengan penerbit untuk bursa buku murah hingga penyediaan anggaran yang dapat diakses oleh pegawai untuk menerbitkan buku yang menjadi buah karyanya. Keberhasilan pembudayaan ini dapat dicapai jika ada komitmen pimpinan dari unit terkecil sampai pimpinan puncak. Dalam rangka mempercepat pembentukan budaya literasi dan memotivasi ASN gemar membaca dan menulis maka dapat diberikan aneka penghargaan dan insentif sesuai kapasitas mereka.



Sitti Aminah
Peneliti BPP
Kementerian Dalam Negeri

Opini Akmal Piliang

ANTARA DESENTRALISASI DAN DISINTEGRASI

Demokratisasi pemerintahan daerah dapat menjadi ancaman terhadap integrasi Indonesia dengan karakteristik yang beragam dan majemuk, terutama praktek-praktek demokrasi yang pragmatis dan etnosentris. Berbagai fakta memperlihatkan perilaku-perilaku primordialisme sempit, pengkotakan daerah atas semangat kesukuan dan keagamaan dalam praktek kita berotonomi daerah. Syahwat untuk memekarkan daerah berpotensi menimbulkan disintegrasi dalam berbangsa dan bernegara.

Prof. Maswadi Rauf (2012), mengungkapkan adanya fenomena etnosentrisme yang memicu konflik horizontal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berbagai praktik yang terjadi di daerah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah lebih diidentikkan dengan munculnya "raja-raja kecil" serta sub-ordinasi kepemimpinan pemerintahan antara pusat dan daerah, demokrasi biaya tinggi, munculnya konflik horizontal dalam berbagai event demokra-

si lokal, serta semakin besarnya syahwat dari elit-elit politik di tingkat lokal yang bertidak anarkis, dengan mengatasnamakan semangat berdemokrasi dan berotonomi daerah.

Pendekatan sosial budaya serta terbanggunya rencana pembangunan sosial yang komprehensif dalam sebuah negara, sejatinya membutuhkan dukungan *human resources* yang memiliki loyalitas dan dapat digerakan secara efektif. Menyiapkan sumberdaya manusia yang berasal dari masyarakat umum dengan latar belakang etnis, kepentingan yang sangat beragam, latar belakang pekerjaan yang berbeda dan disparitas pendidikan yang relatif tinggi, serta orientasi dan loyalitas yang cenderung rapuh, menjadi tantangan terbesar dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia.

Agar kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tidak melahirkan bibit-bibit disintegrasi bangsa, maka alternatif langkah yang cukup efektif, namun belum berjalan secara optimal adalah dengan menjadikan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai komponen inti dari Rencana Umum Pema-

ngunan Sosial Budaya, serta membangun pengembangan kelembagaan pembangunan sosial budaya yang melibatkan ASN secara komprehensif dan holistik. Artinya, ASN perlu dioptimalkan sebagai kekuatan inti dalam pembangunan sosial budaya, sehingga menjadi perekat integritas kita dalam berbangsa. Kenapa harus ASN? Setidaknya ada 3 (tiga) alasan untuk untuk menjawabnya.

Pertama, jumlah PNS sebagai salah satu komponen ASN sangat besar. Data menunjukkan bahwa pada 2014 (Menurut BPS 2016), jumlah PNS yang tercatat adalah sebanyak 4.455.303 jiwa, terdiri atas 2.288.631 laki-laki dan 2.166.672 perempuan. Jumlah tersebut bisa saja terus bertambah dalam 3 tahun terakhir menjadi 5 juta orang, yang terdistribusi bekerja di pemerintah pusat sebanyak 909.426 orang, di pemerintah provinsi sebanyak 297.774 orang, dan 3.298.103 orang di pemerintah kabupaten/kota se Indonesia, dengan demikian sebesar 21% adalah pegawai pemerintah pusat dan 79% adalah pegawai pemerintah daerah. Artinya, secara kuantitas jumlah tersebut cukup potensial untuk menjadi agent pembangunan sosial budaya dan perekat kesatuan bangsa, apalagi jika digabungkan dengan PPPK sebagai bagian dari ASN dan tenaga supporting staf, maka jumlah ASN sangat signifikan sebagai perekat integritas bangsa.

Kedua, sebanyak 40% dari jumlah pegawai tersebut adalah tenaga pendidik atau guru. Karakter sebuah bangsa sangat ditentukan oleh peran guru dalam melakukan doktrin nilai-nilai kebangsaan kepada peserta didiknya. Disamping itu, hampir semua PNS yang bekerja di pemerintah pusat, provinsi hingga daerah kabupaten/kota, memiliki loyalitas yang tegak lurus dengan nilai kebangsaan, bahkan tidak ada PNS yang tidak memahami kebijakan dan regulasi pemerintahan. Dengan potensi yang demikian, maka PNS harusnya mampu menularkan semangat kebangsaan kepada keluarga, kerabat, serta lingkungan tempat tinggalnya melalui penetrasi

infiltrasi sosial budaya yang rencanakan dengan baik, serta melalui pelembagaan yang baik.

Ketiga, tersebarinya lebih dari 79% PNS di 542 daerah provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia, dimana mereka berbau, bersosialisasi, bahkan terlibat dalam berbagai organisasi sosial kemasyarakatan di masing-masing daerah, dapat menjadi *agent of change* bagi penguatan nilai-nilai kebangsaan di Indonesia

Selama ini, pelembagaan terhadap PNS sebagai perekat integritas berbangsa dan bernegara, cenderung hanya dilakukan melalui seperti Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan lembaga sejenisnya. Faktanya, tujuan untuk menjadikan ASN sebagai bagian dari kekuatan perekat bangsa, belum memperlihatkan hasil yang optimal. Jangankan menjadi lebih kuat menjadi perekat integritas bangsa, KORPRI yang dulu mampu menghimpun pegawai BUMN, pegawai BUMD bahkan seluruh perangkat pemerintahan desa sebagai bagian dari KORPRI, sekarang terpecah-pecah membentuk organisasi sendiri, seperti PGRI, Asosiasi Pegawai BUMN, BUMD dan Paguyuban Perangkat Desa. Hal ini terjadi karena tidak adanya desain pembangunan sosial budaya yang menempatkan ASN sebagai kekuatan perekat integrasi bangsa, melalui pendekatan sosial budaya yang lebih komprehensif.

Kedepan, penguatan ASN sebagai perekat integritas berbangsa dan bernegara, perlu didesain dengan perencanaan yang komprehensif, misalnya melalui penyusunan Rencana Umum Pembangunan Sosial Budaya, serta membangun pengembangan kelembagaan pembangunan sosial budaya yang melibatkan ASN sebagai kekuatan inti. Integrasi berbangsa membutuhkan aktor-aktor yang secara nyata memiliki loyalitas yang kuat kepada negara, dan kapasitas yang memadai untuk menjadi *agent of change* melalui pendekatan sosial budaya yang sesuai dengan kearifan lokal masing-masing, disinilah peran ASN sebagai aktor yang tepat



Akmal Piliang,
Ditjen Otda
Kementerian Dalam Negeri



KOTA CERDAS

Data Badan Pusat Statistik 2017 menunjukkan, pada 2035 sekira 67 persen penduduk Indonesia diprediksi akan mendiami kawasan perkotaan. Dan, tentu saja dengan begitu kawasan perkotaan akan semakin padat. Kepadatan tersebut sudah barang pasti pula berujung pada kompleksitas permasalahan (seperti kemacetan, keamanan warga kota, sampai penumpukan sampah) yang perlu penanganan cepat dan tepat oleh pemerintah daerah melalui pelbagai terobosan. Terobosan itu kiranya patut diwujudkan dengan mengembangkan model Kota Cerdas (*smart city*) sebagaimana dikembangkan oleh beberapa negara maju di belahan bumi ini.

Dari sisi terminologi, Kota Cerdas sejatinya adalah visi pengembangan kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan *internet of things*. Konsep internet of things adalah konsep yang secara sederhana bicara mengenai konektivitas semua perangkat yang bisa terhubung ke internet. Konsep Kota Cerdas dipakai untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Atau, dengan kata lain *uses digital technologies to enhance performance and well being* itu yang utama.

Melalui konsep Kota Cerdas, pemerintah daerah didorong untuk melakukan inovasi dan pembaruan khususnya pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi informasi. Penekanan pembangunan dengan penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari diharapkan menjadikan kota dapat melayani warga dan menghadirkan solusi bagi permasalahan di daerah. Konsep ini yang kemudian diterapkan di beberapa Kota Cerdas unggulan seperti Copenhagen, Seoul, Amsterdam dan Barcelona. Sementara, di Indonesia baru beberapa kota saja sudah mengembangkan Kota Cerdas ini, di antaranya adalah Bandung, Surabaya, Makassar, dan Jakarta.

Kendati begitu, belum adanya standarisasi yang jelas dalam pengaturannya menjadi satu persoalan tersendiri bagi masa depan pengembangan Kota Cerdas. Sejauh ini, implementasi Kota Cerdas masih bersandar pada Perpres No 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar (*broadband*) Indonesia 2014-2019. Kalau pun ada regulasi, regulasi itu hanya mengatur perihal *e-government* yang hubungannya dengan transparansi, seperti termaktub dalam Inpres No 3 Tahun 2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government; UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan PP No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Padahal, regulasi *e-government* saja tidak bisa dijadikan payung hukum pelaksanaan Kota Cerdas.

Hal-hal terkait pedoman Kota Cerdas, seperti sumber teknologi, konektivitas antardaerah, dan sumber pembiayaan belum jelas. Sementara, regulasi tentang Kota Cerdas itu intinya berisi perihal pengaturan bagaimana pemerintah kota melayani orang. Belum adanya payung hukum berupa regulasi yang secara tegas, jelas, dan pasti yang mengamanatkan atau mewajibkan paling tidak melindungi pemerintah daerah melakukan

pembaruan dan inovasi di bidang teknologi informasi terkait perwujudan Kota Cerdas bisa mengakibatkan terjadi multi tafsir dan keragu-raguan. Sementara, cakupan inovasi penggunaan teknologi informasi begitu luas. Landasan hukum di Indonesia berupa hukum positif tertulis belum mampu menjangkau begitu ragamnya inovasi yang bisa muncul.

Memang, secara khusus inovasi telah ada landasan hukumnya sebagaimana termaktub dalam Bab XXI khususnya Pasal 386 s.d Pasal 390 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, perangkat undang-undang yang ada tidak menyebut secara tegas penggunaan teknologi informasi sebagai basis inovasi oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Cerdas. Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah pernah menjanjikan akan menerbitkan Peraturan Presiden terkait Kota Cerdas pada September 2017. Tetapi, sampai hari ini belum terdengar lagi kelanjutannya.

Oleh karenanya, sembari menunggu Peraturan Presiden seperti yang sudah dijanjikan, Kemendagri melalui Ditjen Otonomi Daerah dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah perlu menginisiasi lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur secara terperinci landasan regulasi bagi pemerintah daerah untuk menggalakkan terbentuknya Kota Cerdas.

Regulasi yang berisi norma, standar, kriteria, dan prosedur itu paling tidak memuat enam (6) prinsip terkait (a) Pemerintahan, yaitu tata kelola pemerintahan yang transparan dan informatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik melalui beberapa kanal pengaduan (b) Ekonomi, yaitu semangat kewirausahaan dan inovasi kepada masyarakat agar tercapai produktivitas yang tinggi (c) Manusia, yaitu kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan memfasilitasi kebutuhan hidup layak, meningkatkan indeks harapan hidup, dan akses informasi publik (d) Mobilitas, yaitu sistem integrasi transportasi dan infrastruktur teknologi informasi yang mampu mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi (e) Lingkungan, yaitu kualitas lingkungan yang sehat melalui manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan, sehingga menjadi kota layak huni, dan (f) Kehidupan, yaitu kota sehat dan kemudahan akses informasi kesehatan, pariwisata, dan fasilitas keamanan.

Selain itu, sebagai catatan kritis yang perlu digarisbawahi adalah bahwa tiap-tiap daerah memiliki permasalahan kota yang berbeda, sehingga Kota Cerdas tidak bisa dilaksanakan hanya dengan konsep "copy-paste" tanpa memerhatikan faktor keberlanjutannya. Kota Cerdas bukanlah sebatas *command center* dan aplikasi pendukung, melainkan pemahaman menyeluruh mengenai konsep Kota Cerdas haruslah dimiliki oleh tiap pemerintah daerah, sehingga teknologi yang dibuat dapat digunakan sebaik dan seefektif mungkin. Tiap pemerintah daerah harus berpikir maju untuk menjawab permasalahan kota dan menghadirkan solusi yang berkelanjutan.

● Moh Ilham A Hamudy

Call for Papers

MATRA PEMBARUAN
Jurnal Inovasi Kebijakan

Matra Pembaruan (MP) merupakan jurnal baru di bawah naungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, yang fokus pada publikasi hasil penelitian tentang inovasi kebijakan pemerintah. MP terbit sebanyak tiga kali setahun (Maret, Juli, dan November).

MP memuat naskah hasil penelitian terkait pelbagai inovasi kebijakan. Oleh karenanya, kami mengundang para peneliti, dosen, mahasiswa, dan para pemerhati inovasi untuk mengirimkan naskah hasil penelitiannya agar dapat dimuat di Matra Pembaruan.

KONTRIBUSI NASKAH DIKIRIMKAN DENGAN MENGIKUTI PETUNJUK SEBAGAI BERIKUT:

- Naskah merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat.
- Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespon isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan dalam berbagai perspektif.
- Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38.000 s.d 40.000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada). Naskah dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.
- Sumber referensi minimal 10 buah dan 50% di antaranya harus berasal dari sumber primer, seperti: jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan/atau disertasi.

Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Sedangkan gaya penulisan referensi dan kutipan MP menggunakan gaya APA (American Psychological Association) style. Lampirkan biodata ringkas dan nomor telepon seluler penulis.

Kirimkan artikel Anda ke
redaksi@matrapembaruan.com



Jurnal Matra Pembaruan Diterbitkan Oleh:
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri



WWW.MATRAPEMBARUAN.COM

“ Home Affairs Governance ”

Regional Autonomy and Bureaucracy
Politics and Public Administration
Territorial Administration
and Rural Governance
Population and Civil Registration
Regional Election and Regional Innovation
Regional Fiscal Policy and Development
Other Issues in Public Administration

Researchers,
lecturers, and
public administration
experts are invited to
contribute their scientific
papers to

JURNAL BINA PRAJA

PUBLISHED BY

RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY
MINISTRY OF HOME AFFAIRS



THEME & SUBTHEME

BINAPRAJAJOURNAL.COM

CALL FOR PAPERS

Accredited No 735/AU2/P2MI-LIP/04/2016
INDEXED BY:



TERMS & CONDITIONS

Open to the public |
Manuscripts may contain
the results of empirical or
nonempirical research |

Manuscripts should address the theme
and subthemes set by the Jurnal Bina Praja
Editorial Team | Submitted manuscripts

have not been published in other media |

Manuscripts should have a minimum of 38000-
40000 character in Indonesian or English

(preferably in English) | For the writing systematics
and format, see <http://binaprajajournal.com> | A minimum

of 10 references taken from primary sources (scientific
journals articles, dissertations, master's theses, undergraduate

theses, and/or other research reports) | Attach biodata along
with complete mailing address and contact number

Submit a scientific paper
on the theme of Home Affairs Governance to editorial@binaprajajournal.com